



Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

# LKIP | 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Bidang, Sekretariat dan UPT di BKD Provinsi DKI Jakarta. Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BKD Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 29 Januari 2022  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



  
Maria Qibtya  
NIP. 196507191985032002



## ata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Bidang, Sekretariat dan UPT di BKD Provinsi DKI Jakarta. Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BKD Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 29 Januari 2022  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Maria Qibtya  
NIP 1965071985032002

# aftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	1
C. Isu Strategis Organisasi	14
D. Sistematika Penyajian	16
<b>II. Perencanaan Kinerja</b>	<b>17</b>
A. Rencana Strategis 2017 - 2022	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	21
D. Indikator Kinerja Program	24
E. Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah	24
F. Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan sasaran Operasional	25
<b>III. Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>27</b>
A. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	27
B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	46
C. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program	60
D. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah	78
E. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional	81
F. Penghargaan dan Prestasi	82
G. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	86

<b>IV. Penutup</b>	<b>100</b>
<b>A. Kesimpulan</b>	<b>100</b>
<b>B. Rekomendasi dan Saran</b>	<b>100</b>

**Lampiran:**

- 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta**
- 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021**
- 3. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021**
- 4. Daftar Rekapitulasi Capaian Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021**
- 5. Daftar Rekapitulasi Capaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD) BKD Tahun 2021**



## khtisar Eksekutif

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis (diluar indikator kinerja kegiatan sasaran strategis - KSD) yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022;

Rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 95.9%. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diperjanjikan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak dapat terealisasi secara optimal yaitu “Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)” serta “Indeks Reformasi Birokrasi”. Berikut ini adalah rincian hasil evaluasi 4 (empat) indikator kinerja perjanjian kinerja (Perkin) Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (diluar indikator kinerja kegiatan sasaran strategis - KSD) :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	46.8	42.12	90
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	290	290	100
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85	78.88	92.8
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91.8%	100.8
<b>Rata-Rata Prosentase Capaian Kinerja</b>					<b>95.9</b>

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun sebelumnya sebesar 88.3%, maka pada tahun 2021 terdapat trend kenaikan capaian sasaran strategis sebesar 7.6% menjadi 95.9%. Peningkatan trend capaian tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan strategis daerah (KSD) dengan rata-rata capaian sebesar 99.86% serta adanya dukungan sumber daya meliputi SDM dan anggaran melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan serta 83 rincian sub kegiatan (RSK) dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 343.946.369.875,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 338.594.177.404,- atau setara 98,4%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Program	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	A.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 12.735.555.320	Rp. 10.638.975.442	83.5
2.	B.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	100
3.	A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 330.736.869.809	Rp. 327.519.236.558	99

No	Kode Program	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4.	B.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 407.944.746	Rp. 369.965.404	90.7
<b>Total</b>			<b>Rp. 343.946.369.875</b>	<b>Rp. 338.594.177.404</b>	<b>98.4</b>



# BAB. I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

## B. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain : **aspek organisasi, sumber daya manusia serta pendanaan.**



## Aspek Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi - fungsi yang harus dijalankan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;
- d. penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
- e. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
- f. pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
- g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- h. pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- i. pengembangan karir pegawai;
- j. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional dan petensi Pegawai;
- k. pelaksanaan konseling pegawai;
- l. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- m. penyusunan standar kompetensi;
- n. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
- o. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
- p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- q. pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian daerah;

- r. pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
- s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- t. pembinaan pegawai KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BKD;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD; dan
- x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

BKD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BKD. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Sekretariat secara garis besar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
- d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD oleh unit kerja BKD;
- f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis BKD;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BKD;
- h. pengelolaan layanan kepegawaian BKD
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BKD;

- k. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BKD;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas BKD;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Subbagian Kepegawaian;
- 3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
- 4) Subbagian Keuangan.

Tiap Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

## 2. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan pegawai;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan persetujuan teknis penyusunan dan penetapan formasi pegawai meliputi pegawai baru, pegawai tugas belajar dan ijin belajar;
- e. penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai;
- f. perencanaan penempatan pegawai;
- g. penyelesaian penetapan calon pegawai menjadi pegawai;

- h. perencanaan pelaksanaan sumpah/janji pegawai;
- i. penyusunan rencana pemindahan dan pendayagunaan pegawai;
- j. fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan pegawai; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Perencanaan Pegawai;
- 2) Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai;
- 3) Subbidang Mutasi.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### 3. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepangkatan;
- e. penyusunan dan perencanaan pengembangan karier pegawai;
- f. penganalisaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pejabat;
- g. penyusunan rencana pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan proses kenaikan pangkat berdasarkan ujian penyesuaian ijazah;
- i. pelaksanaan ujian dinas untuk kenaikan pangkat;

- j. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian, dan administrasi kenaikan jabatan pejabat fungsional;
- k. pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan Struktural;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Pengembangan Karier;
- 2) Subbidang Kepangkatan;
- 3) Subbidang Jabatan Fungsional.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 4. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- e. penyusunan regulasi peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. penyusunan dan pelaporan hasil kajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- g. penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kesejahteraan pegawai;
- i. pelaksanaan proses pemberian cuti pegawai;
- j. pengkajian dan pemrosesan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- k. penyelesaian proses penetapan pensiun pegawai;

- l. pengurusan hak-hak kesejahteraan pegawai; dan
- m. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- 2) Subbidang Penghargaan;
- 3) Subbidang Pensiun dan Cuti.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 5. Bidang Pengendalian Kepegawaian

Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Pegawai;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian Pegawai;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian Pegawai;
- d. penghimpunan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- f. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan hukum pegawai kepada pimpinan dan/atau kepada kepala SKPD/UKPD;
- h. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- i. pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai termasuk penjatuhan hukuman disiplin pegawai pada SKPD/UKPD;
- j. pelaksanaan upaya peningkatan disiplin pegawai;

- k. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis proses penjatuhan disiplin pegawai pada SKPD/UKPD;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) disiplin dan prestasi kerja pegawai;
- m. pengoordinasian proses pelaksanaan penandatanganan penetapan dokumen kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) pimpinan SKPD dan Biro Sekretariat Daerah;
- n. penyusunan standar pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- o. penyusunan rumusan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
- p. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Peraturan Pegawai;
- 2) Subbidang Disiplin Pegawai;
- 3) Subbidang Kinerja Pegawai.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 6. Suku Badan Kepegawaian Kota

Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Badan Kepegawaian Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang sebagian kewenangannya telah dilimpahkan pada lingkup wilayah Kota Administrasi, dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan kepegawaian.

#### 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas teknis pelayanan langsung pengelolaan kepegawaian atau melaksanakan fungsi dukungan teknis

pelaksanaan tugas dan fungsi BKD. Adapun UPT yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD adalah :

- 1) UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (PPKP), berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.
- 2) UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian (Pusdatin), berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kepegawaian.
- 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

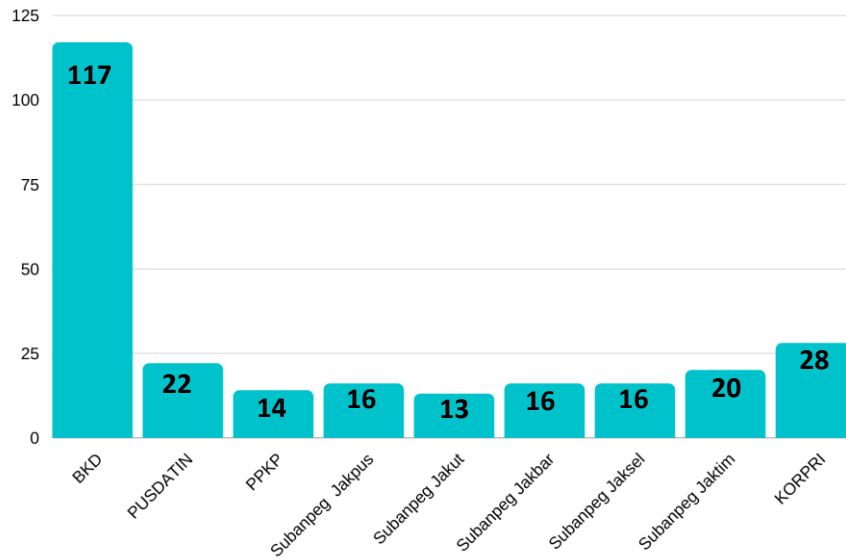
Selain satuan-satuan organisasi di atas, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi BKD sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja. Adapun pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta selengkapnya terdapat dalam daftar lampiran.



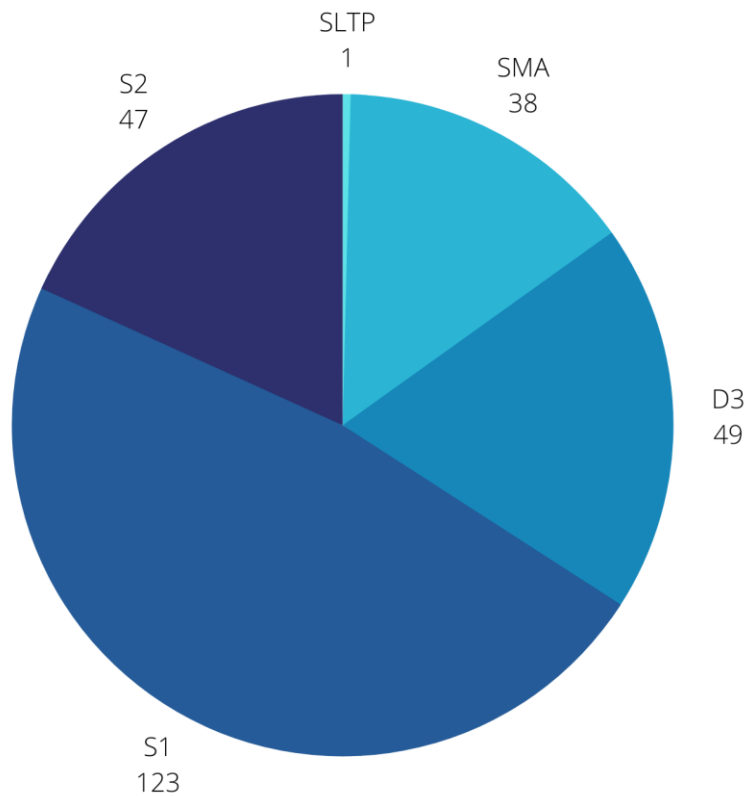
## **Aspek Sumber Daya**

BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 262 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 58.639 pegawai pada kondisi Desember 2021.

**Gambar 1**  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Lokasi Kerja**



**Gambar 2**  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan**



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 123 pegawai (47,7%), diikuti oleh Diploma III (D3) sebanyak 49 pegawai (19%), pegawai berpendidikan Sarjana Strata 2 sebanyak 47 pegawai (18,2%), pegawai berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 38 pegawai (14,7%), pegawai berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sebanyak 1 pegawai (0,4%) seperti diuraikan dalam gambar 2 di atas. Untuk keperluan penyusunan laporan ini, deskripsi di atas dibatasi hanya kepada penjelasan kualifikasi pendidikan berdasarkan kuantitas tanpa mengkaji kesesuaian antara kualitas pendidikan para pegawai dengan kebutuhan BKD Provinsi DKI Jakarta secara khusus maupun kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum.

**Gambar 3**  
**Rasio Jumlah Pegawai BKD dengan Pegawai yang Dilayani**  
**(kondisi Desember 2021)**



Dalam tabel 2 di atas terlihat rasio jumlah personil BKD Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilayani dan memperlihatkan beban kerja yang cukup besar. Untuk mengatasi beban kerja tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta telah mengaplikasikan teknologi informasi yang mutakhir dan tepat guna untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa aplikasi yang dikembangkan BKD Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2021 untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain: eSKP, Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), Sistem Informasi Penghargaan dan Proses online Pengajuan Ujian Penyesuaian Ijazah/ Ujian Peningkatan Pendidikan/Ujian Dinas.



## ASPEK PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 341.701.136.408,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing - masing unit kerja BKD dapat dilihat pada **Tabel 2** dan **Gambar 3**. Sementara untuk realisasi anggaran belanja langsung BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 336.481.507.060 ,- atau sebesar 98,47 % seperti terlihat pada **Gambar 4**.

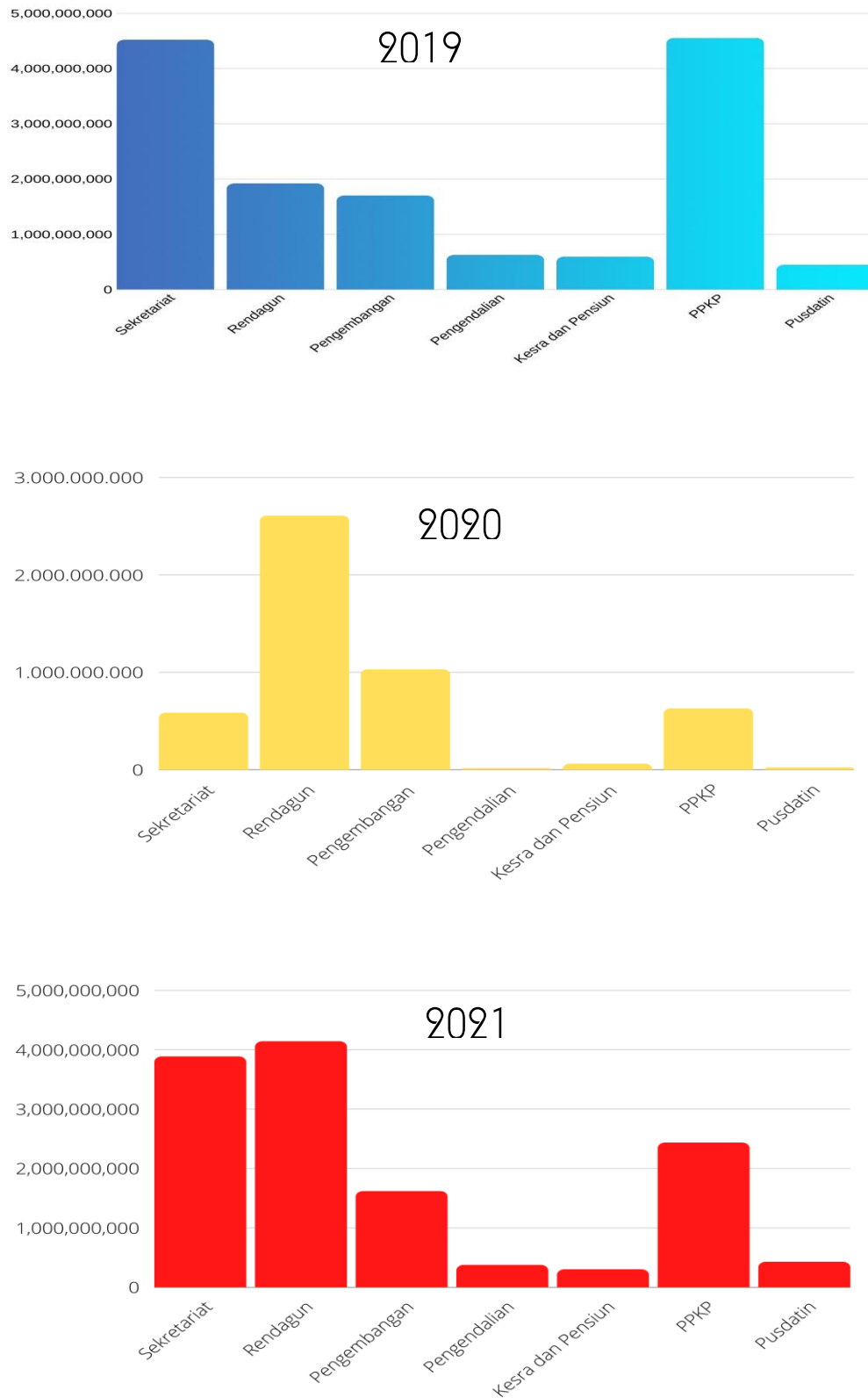
Tabel 1

### Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2019-2021

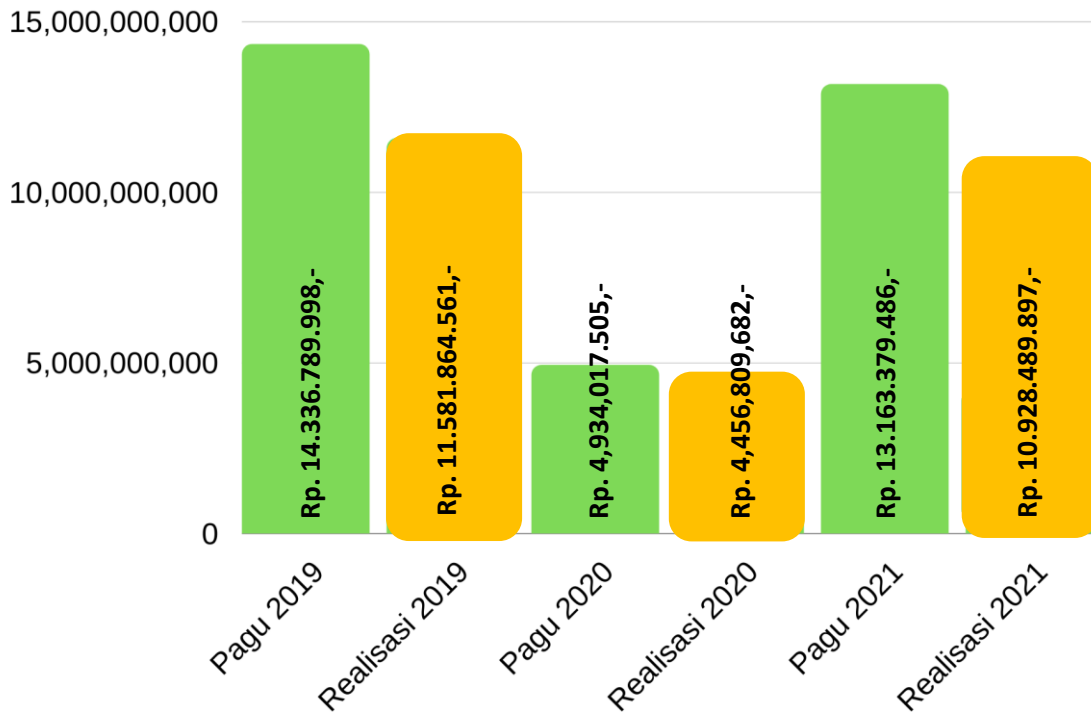
No	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)		
		2019	2020	2021
1.	Sekretariat	4.518.277.001	582,136,186	3.882.561.276
2.	Bidang Rendagun	1.917.471.636	2,605,253,889	4.136.668.960
3.	Bidang Pengembangan	1.697.874.470	1,027,222,890	1.615.185.000
4.	Bidang Pengendalian	621.612.763	14,021,040	373.145.400
5.	Bidang Kesra dan Pensiun	590.103.482	58,950,000	298.500.000
6.	UPT PPKP	4.550.010.686	626,882,500	2.431.646.600
7.	UPT Pusdatin	441.439.960	19,551,000	425.672.250
<b>Total Anggaran</b>		<b>9,296,581,896</b>	<b>11,842,777,823</b>	<b>13,163,379,486</b>

Catatan : Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa digabungkan dengan Sekretariat.

**Gambar 4**  
**Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2019 – 2021**



Gambar 5  
Realisasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2019 – 2021



### C. Isu Strategis

Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta baik internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka berikut ini merupakan isu-isu Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta :

#### 1. *Grand Design* Manajemen ASN.

Penyusunan *grand design* manajemen ASN dibuat untuk kurun waktu 5 tahunan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Gubernur terpilih. *Grand design* ini akan berisi roadmap/peta jalan dari setiap batasan waktu yang ditentukan sehingga dapat menjadi acuan program dan kegiatan bagi BKD Provinsi DKI Jakarta yang selaras antar sub bagian. *Grand design* manajemen ASN akan diklasifikasikan dalam 6 (enam) dimensi sesuai dengan fokus reformasi birokrasi manajemen ASN antara lain : (1) Dimensi perencanaan SDM Aparatur (2) Dimensi rekrutmen dan seleksi (3) Dimensi pengembangan

kompetensi (4) Dimensi penilaian kinerja dan penghargaan (5) Dimensi promosi, rotasi dan karir (6) Dimensi purnabakti.

2. Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja.

Penerapan manajemen berbasis kinerja diawali dengan penyusunan indikator-indikator aktivitas kerja yang terukur pada setiap posisi/jabatan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Indikator-indikator ini dapat diklasifikasikan menjadi indikator kinerja Kepala SKPD, indikator kinerja Kepala Bagian/Bidang/UPT dan indikator kinerja individu jabatan pelaksana yang diturunkan (*cascading*) dari visi dan misi dan sasaran kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem *reward and punishment* yang jelas, sehingga akan terbentuk mekanisme kerja yang terukur dan sesuai dengan kontrak kinerja yang menjadi target pencapaian masing-masing SKPD.

3. Internalisasi Budaya Organisasi.

Budaya organisasi menjadi faktor penguangkit dalam menciptakan ASN Provinsi DKI yang professional, berintegritas, melayani, dan bebas korupsi. Proses internalisasi budaya organisasi memerlukan komitmen pimpinan yang kuat, serta agen perubah (*agent of change*) di setiap SKPD. Selain itu, kontinuitas program internalisasi budaya organisasi menjadi kunci utama keberhasilan program sehingga dukungan anggaran dan waktu yang panjang menjadi faktor yang krusial.

4. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) ASN BKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan kapasitas ASN BKD Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan berbagai kegiatan seperti magang (*Internship*) di lingkungan Kementerian atau Pemerintah Daerah lain yang telah memiliki role model unggul dibidang pengelolaan kepegawaian, *coaching and counseling* yang dilakukan atasan kepada bawahannya melalui mekanisme manajemen berbasis pengetahuan (*knowledge management*) serta keikutsertaan dalam program diklat yang berbasis sertifikasi, antara lain : (1) *Certified Manpower Planner* (2) *Certified Remuneration System* (3) *Certified Career & Talent Management Specialist*

Program (4) Certified Performance Management (4) Certified Human Resources Management Professional.

## D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2021. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, BKD Provinsi DKI Jakarta akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian LKIP BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil BKD Provinsi DKI Jakarta serta menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP tahun 2021.

### Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Kinerja tahun 2021.

### Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan analisis capaian kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta, baik capaian kegiatan maupun sasaran strategis tahun 2021 termasuk akuntabilitas keuangan.

### Bab IV : Penutup

Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh serta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

### 1. Rencana Strategis

#### A. Pernyataan Visi dan Misi RPJMD

Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :



**VISI** Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

**MISI**

- BAGI WARGA**  
Jakarta akan menjadi kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- BAGI BIROKRASI**  
Jakarta akan menjadi wahana aparatur negara untuk berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- BAGI BANGSA DAN NEGARA**  
Jakarta akan menjadi ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinnekaan.
- BAGI PEREKONOMIAN**  
Jakarta akan menjadi kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- BAGI LINGKUNGAN**  
Jakarta akan menjadi kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BKD Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian **misi ketiga** yaitu **menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokrasi dan berintegritas**, dalam lingkup bidang kepegawaian misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

## B. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. Adapun tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam misi ketiga yang menjadi urusan dan kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta yang adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur”**, dengan indikator dan target sebagai berikut :

No	Indikator Tujuan	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	68	73	75	85	91

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terkahir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu, sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran strategis RPJMD yang menjadi kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta **“meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur”**, dengan indikator dan target sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Target Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	89.95	89.96	75	78	90

### C. Tujuan dan Sasaran Renstra

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

▪ **Tujuan :**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	53.96	53.97	43.24	46.8	52

▪ **Sasaran :**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	N/A	N/A	N/A	290	326

## 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta formulir Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas diilustrasikan dalam matriks berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	46.8
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	290
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021 tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan serta 83 (delapan puluh tiga) rincian sub kegiatan (RSK) dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 343.946.369.875,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Program	Program	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Rincian Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	A.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	14	30	Rp. 12.735.555.320
2.	B.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	1	5	Rp. 66.000.000
3.	A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13	23	Rp. 330.736.869.809
4.	B.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	25	Rp. 407.944.746
<b>Total</b>			<b>34</b>	<b>83</b>	<b>Rp. 343.946.369.875</b>

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

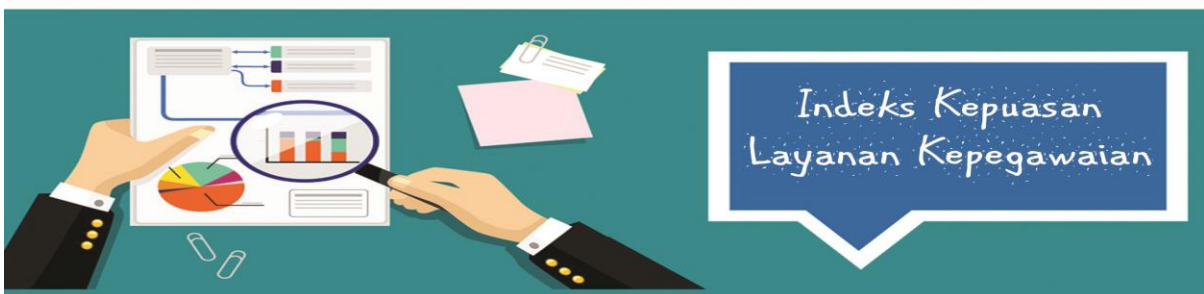
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (*outcome*).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2018-2022, indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :



**IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)**  
**Badan KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI Jakarta**  
 Tahun 2018 - 2022 sesuai Peraturan Kepala BKD Nomor 38 Tahun 2018



Rincian target pada indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam surat keputusan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	89.9
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	90

Adapun berdasarkan surat Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 4.547/-078 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Usulan Revisi Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Tahun 2017-2022, BKD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan target pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN periode Tahun 2020 – 2022 menjadi sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target Awal	Usulan Revisi	Target Awal	Usulan Revisi	Target Awal	Usulan Revisi
Indeks Profesionalitas ASN	89.97	75	89.99	78	90	81

Usulan perubahan target dimaksud disebabkan karena data acuan yang digunakan dalam penetapan target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018-2022 dalam RPJMD mengacu pada hasil perhitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017 sebesar 89.9, dimana metode perhitungannya belum mengacu pada PermenPAN RB dan Perka BKN sehingga masih dilakukan secara manual menggunakan form excel/kertas kerja yang disampaikan oleh BKN dengan indikator/dimensi penilaian yang terdiri dari : Kompetensi, Kinerja, Kompensasi dan Disiplin tanpa disertai pembobotan di masing-masing indikator/dimensi.

Pada Tahun 2018 dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, indikator/dimensi dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengalami perubahan dengan menggunakan pembobotan. Adapun indikator/dimensi penilaiannya terdiri dari : Kualifikasi (bobot 25%), Kompetensi (bobot 40%), Kinerja (bobot 30%) dan Disiplin (bobot 5%). Atas dasar hal tersebut, serta mempertimbangkan adanya potensi penurunan dukungan APBD terhadap kegiatan-kegiatan BKD dan BPSDM yang memiliki kontribusi untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi dan kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka diusulkan penyesuaian target capaian di periode Tahun 2020 - 2022. Selanjutnya, berdasarkan hasil supervisi dan verifikasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta, maka disepakati perubahan target Indeks Profesionalitas ASN yang akan diakomodir dalam perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022	
	Usulan Revisi	Hasil Supervisi/Verifikasi	Usulan Revisi	Hasil Supervisi/Verifikasi	Usulan Revisi	Hasil Supervisi/Verifikasi
Indeks Profesionalitas ASN	75	75	78	78	81	90

#### 4. Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut :

Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	80
	Indeks Capaian Kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	88
	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	11%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	90
	Indeks Kepuasan Layanan KORPRI	90

#### 5. Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2021

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), pada tahun 2021 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan strategis daerah (KSD) dengan target 53 (lima puluh tiga) rencana aksi sebagaimana dijabarkan dalam matriks dibawah ini :

No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Jumlah Rencana Aksi	Target Periode			
			B.03	B.06	B.09	B.12
1.	Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif – KSD 12	1	N/A	100%	100%	100%
2.	Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak – KSD 13	1	100%	100%	100%	100%

No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Jumlah Rencana Aksi	Target Periode			
			B.03	B.06	B.09	B.12
3.	Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) – KSD 17	1	N/A	100%	N/A	N/A
4.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – KSD 41	1	N/A	100%	N/A	N/A
5.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA – KSD 39	4	100%	100%	100%	100%
6.	Pengembangan Smart City Tahun 2021 – KSD 43	1	N/A	N/A	100%	N/A
7.	Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management – KSD 60	1	100%	100%	100%	100%
8.	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan – KSD 61	4	N/A	100%	100%	100%
9.	Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN – KSD 62	3	100%	100%	100%	100%
10.	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik ) Tahun 2021 – KSD 63	1	N/A	N/A	100%	N/A
11.	Penguatan Peran Walikota /Bupati Dalam Penataan Kawasan – KSD 63	1	N/A	100%	N/A	100%
12.	Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta – KSD 68	5	100%	100%	100%	100%
<b>Jumlah Rencana Aksi</b>		<b>24</b>				

## 6. Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, pada tahun 2021 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 6 (enam) Indikator Sasaran Khusus dan 3 Indikator Sasaran Operasional dengan target sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran Khusus</b>			
1	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Cakupan survei kepuasan pelayanan kepegawaian	75%
2	Terlaksananya Implementasi nilai-nilai budaya kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai budaya kerja	80%
3	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	81
<b>Sasaran Operasional</b>			
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%



## BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Indikator	Kategori Capaian	Rentang Nilai Capaian	
		Minimal	Maksimal
101% – 110%	Sangat Baik	110	120
100%	Baik	109	
80% – 99%	Cukup	70	89
60% – 79%	Kurang	50	69
0% – 50%	Sangat Kurang	0	49

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja juga merupakan representasi dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target 4 (empat) yang diukur dalam 4 (empat) indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021.

### 1. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja sasaran strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

### a. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya profesionalitas				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	Nilai	46.8	42.12	90

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun dari 4 (empat) dimensi dimaksud yang menjadi kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah 3 (tiga) dimensi sebagai berikut :

#### 1. Kualifikasi (bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

#### 2. Kinerja (bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja.

## 3. Disiplin (bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) tahun 2021 yang dilakukan terhadap 53.794 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Dimensi	Bobot per Dimensi	Capaian Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Kualifikasi	25%	13.04%	52.2
2.	Kinerja	30%	24.08%	80.3
3.	Disiplin	5%	5%	100
Nilai akhir indeks			42.12%	

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa dari 3 (tiga) dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, capaian dimensi kualifikasi menjadi yang paling rendah. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 BKD Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS sebagai tindak lanjut dari adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional sehingga pada periode kenaikan pangkat April tahun 2021 BKD Provinsi DKI Jakarta kehilangan potensi adanya peningkatan status pendidikan sebanyak ± 1.200 pegawai.

**Sasaran Strategis 2**

Terwujudnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Merit	Nilai	290	290	100%

Perhitungan indikator “Indeks Sistem Merit” mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) aspek dengan menggunakan pembobotan, sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	10%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir	30%
4	Promosi dan Mutasi	10%
5	Manajemen Kinerja	20%
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%
7	Perlindungan dan Pelayanan	4%
8	Sistem Informasi	6%

Indikator penilaian terhadap seluruh aspek diatas dijabarkan kedalam beberapa Sub Aspek penilaian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut :

Skor	Kategori	Indikator
4	Sangat Baik	Apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan
3	Baik	Apabila semua elemen yang diukur cukup lengkap namun terdapat elemen memenuhi ketentuan
2	Kurang	Apabila semua elemen yang diukur kurang lengkap
1	Buruk	Apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia

Penetapan tingkat penerapan sistem merit akan dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tingkatan sebagai berikut :

Kategori	Nilai	Indeks	Sebutan
IV	325 - 400	0.81 - 1	Sangat Baik
III	250 - 324	0.61 - 0.8	Baik
II	175 - 249	0.41 - 0.6	Kurang
I	100 - 174	0.2 - 0.4	Buruk

Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Sistem Merit, sesuai undangan Ketua KASN Nomor UND-17/KASN/I/2021 hal Penyerahan Keputusan dan Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit, pada tanggal 28 Januari 2021, bertempat di Hotel Bidakara, Pemprov. DKI Jakarta menjadi salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang mendapatkan Anugerah Meritokrasi pada kategori III (Baik) dengan total nilai 290 atas penilaian penerapan sistem merit yang dilakukan oleh KASN tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 23/KEP.KASN/C/IX/2020 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Adapun dalam surat keputusan dimaksud, KASN juga memberikan 20 rekomendasi perbaikan pada 7 aspek penilaian dengan rincian sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Nilai Maksimal (sesuai Perka KASN)	Capaian Tahun 2021	Jumlah Rekomendasi Perbaikan
1.	Perencanaan Kebutuhan	40	35	1
2.	Pengadaan	40	38	1
3.	Pengembangan Karir	130	65	8
4.	Promosi dan Mutasi	40	15	3
5.	Manajemen Kinerja	80	67.5	2
6.	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	32.5	3
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	-
8.	Sistem Informasi	24	21	2
<b>Jumlah</b>		<b>410</b>	<b>290</b>	<b>20</b>

Selanjutnya, seluruh rekomendasi dimaksud harus di tindaklanjuti pada proses penilaian di tahun berikutnya.

Sasaran Strategis 3				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	78.88	92.8

Perhitungan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu :

No	Area Perubahan
1	Manajemen Perubahan
2	Penguatan Pengawasan
3	Pengembangan Karir
4	Penguatan akuntabilitas
5	Penataan Organisasi
6	Penataan tatalaksana
7	Deregulasi Kebijakan
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021, berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/87/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ditetapkan sebesar 78.88 dengan kategori BB. Berikut ini beberapa rekomendasi hasil penilaian Kementerian PAN dan RB yang perlu ditindaklanjuti :

1. Mengupayakan perbaikan segera terhadap penilaian hasil antara yang belum baik, antara lain Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agar tampak perubahan yang dilakukan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *quick wins* yang telah ditetapkan sehingga dapat dilihat capaian data kuantitatif.
4. Melakukan internalisasi *core values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah di internalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan zona integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, sistem pengawasan dan sistem integritas di tingkat unit kerja.
6. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh APIP dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian ketiga indikator kinerja sasaran strategis diatas, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 14 Sub Kegiatan dan 35 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.10.704.975.442,- atau setara 83.62% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 12.801.555.320,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Jumlah RSK	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Program Daerah Kepegawaian	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1	100%	92,63%
		2 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	100%	100,00%
		3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1	100%	100,00%
		4 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	100%	96,06%
		5 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	100%	62,58%
		6 Pengelolaan Mutasi ASN	1	100%	99,52%
		7 Pengelolaan Promosi ASN	3	100%	56,64%
		8 Pengelolaan Assessment Center	4	100%	95,89%
		9 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	100%	6,67%
		10 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6	100%	99,85%
		11 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	100%	99,20%
		12 Pengelolaan Data Kepegawaian	2	100%	99,00%
		13 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	100%	92,23%
		14 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	9	100%	93,14%

Selain didukung oleh pelaksanaan program, sub kegiatan dan rincian sub kegiatan (RSK), keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja sasaran juga tidak terlepas dari pencapaian beberapa rencana aksi KSD sebagai berikut :

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	% Capaian
<b>KSD 61 - Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan</b>						
1	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B06	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 25 nama jabatan. Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator	100%
2	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B09	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 40 nama jabatan.  Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator.	100%
3	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B12	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 135 nama jabatan.  Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator.	100%
4	Pola Pengembangan Karir	Tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi	Pola karier dan peta jabatan pimpinan tinggi	B12	1. Tersusunnya Update Rancangan peta jabatan pimpinan tinggi yang menjadi dasar dalam menentukan jalur karier jabatan; 2. Tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi.  Data Dukung: 1. Update Rancangan peta jabatan pimpinan tinggi yang menjadi dasar dalam menentukan jalur karier jabatan; 2. Peraturan Gubernur tentang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi.	100%
5	Penyusunan Talent Pool	Tersedianya tools untuk memetakan pejabat pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya atau sebagai bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi.	Tersedianya database profil potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan kompeten untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan surat keputusan yang berlaku.	B09	Penyusunan database profil kinerja dan kompetensi pegawai berdasarkan kuadran talent pool Data Dukung: Database profil kinerja dan kompetensi pegawai berdasarkan kuadran talent pool	100%

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	% Capaian
<b>KSD 68 - Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta</b>						
1	Sosialisasi Nilai-nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Tersosialisasikannya Nilai-Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Tersosialisasikannya Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja	B03	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 1	100%
				B06	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 2	100%
				B09	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 3	100%
				B12	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 4	100%
2	Penyusunan Program kerja agen perubahan	Tersusunnya Program kerja agen perubahan	Tersusunnya dokumen program kerja agen perubahan	B06	1. Program kerja agen perubahan 2. Materi agen perubahan budaya kerja	100%
3	Penyusunan Road Map Transformasi Budaya	Tersusunnya Road Map Transformasi Budaya Kerja	Tersusunnya Pergub Road Map Transformasi Budaya Kerja	B09	Kajian Road Map Transformasi Budaya Kerja	100%
				B12	Pergub/Kepgub terkait Road Map Transformasi Budaya	90%
4	Pelaksanaan agen perubahan sharing forum	Terjadinya knowledge sharing dalam sharing forum bagi agen perubahan	Terlaksananya sharing forum bagi agen perubahan	B12	Pelaksanaan sharing forum bagi agen perubahan	100%
5	Penyusunan Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Ditetapkannya Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	B12	Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	100%

## Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91	91.8	100.8

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

a) Penyerapan Anggaran;

Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

b) Efisiensi;

Merupakan sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarasannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

c) Pencapaian output;

Komponen ini mengukur persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

a) Serapan Anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$$

b) Serapan Anggaran  $< 80\%$  dan output  $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

c) Serapan Anggaran  $\geq 80\%$ , namun output  $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran 4 (empat) bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 sebesar 91.8% dari yang ditargetkan sebesar 91% dalam dokumen perjanjian kinerja atau setara 100.8%. Dalam rangka mendukung pencapaian ketiga indikator kinerja sasaran strategis dimaksud, BKD melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam 13 Sub Kegiatan dan 45 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.327.889.201.962,- atau setara 99.02% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 331.144.814.555,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Jumlah RSK	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	100%	99,09%
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	100%	88,09%
		3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	100%	89,90%
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	7	100%	76,81%
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	100%	99,74%
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100%	100,00%
		7 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	100%	92,11%
		8 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	100%	97,19%
		9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	100%	93,77%
		10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	100%	81,20%
		11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	100%	99,35%
		12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	100%	48,35%
		13 Penyediaan Bahan/Material	2	100%	100,00%

## b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah dalam RPJMD

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra :

Indikator Kinerja 1					
Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	53.96	53.97	43.24	46.8	52
Capaian	47,09	41,36	43,24	42.12	-
% Capaian	87.3%	76.6%	100%	90%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					81%

Mengacu pada data tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 87.3% menjadi 100%. Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa kegiatan secara rutin dan berkala diantaranya :

- Pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan PNS;
- Pelaksanaan bimtek pembinaan disiplin pegawai secara berkala;
- Supervisi dan monitoring penyusunan SKP dan PPK Perangkat Daerah secara berkala;
- Sinkronisasi data pegawai dalam SIMPEG dan SAPK melalui kegiatan rekonsiliasi secara berkala dengan BKN.

Namun pada tahun 2021 terdapat penurunan capaian dari 100% menjadi 90% dengan rincian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Perubahan
		2020	2021	
1.	<b>Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)</b>	<b>43.24</b>	<b>42.12</b>	<b>(1.12)</b>
	- Dimensi Kualifikasi	13.18	13.04	(0.14)
	- Dimensi Kinerja	25.10	24.08	(1.02)
	- Dimensi Disiplin	4.96	5	0.04

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa dari 3 (tiga) dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 (dua) dimensi yang mengalami trend penurunan capaian di tahun 2021 yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kinerja. Penurunan capaian pada dimensi kualifikasi disebabkan karena pada tahun 2020 BKD Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS sebagai tindak lanjut dari adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional sehingga pada periode kenaikan pangkat April tahun 2021 BKD Provinsi DKI Jakarta kehilangan potensi adanya peningkatan status pendidikan sebanyak  $\pm 1.200$  pegawai.

Adapun penurunan capaian pada dimensi kinerja disebabkan karena adanya transisi pelaporan capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi tersistem melalui aplikasi SIMPEG ([pegawai.jakarta.go.id](http://pegawai.jakarta.go.id)) sehingga dari jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 sebanyak 58.643 orang tercatat sebanyak  $\pm 9.000$  pegawai belum melakukan penginputan nilai PPK Tahun 2020. Dalam rangka merespon hal tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Profil Pegawai dan Riwayat SKP, dimana sampai dengan laporan ini tersusun, jumlah pegawai yang

belum melakukan penginputan nilai PPK Tahun 2020 berkurang menjadi 4.849 orang.

Selanjutnya, dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta upaya berkelanjutan dalam mengintegrasikan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan sistem informasi kediklatan (SIMDIKLAT) dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) sebesar 52.

Indikator Kinerja 2					
Indeks Sistem Merit					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	N/A	N/A	N/A	290	326
Capaian	N/A	N/A	N/A	290	-
% Capaian	N/A	N/A	N/A	100%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					88.9%

Target indikator kinerja indeks sistem merit baru mulai diperhitungkan pada tahun 2020 dikarenakan petunjuk teknis tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 baru diterbitkan pada Tahun 2019. Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai indeks sistem merit tahun 2021 dapat tercapai sesuai dengan target sebesar 290. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- b. Pelaksanaan diklat latsar CPNS;
- c. Penyusunan rancangan kebijakan tentang manajemen talenta dan pola karir;

- d. Pembuatan sistem *talent pool*;
- e. Pelaksanaan uji kompetensi pegawai;
- f. Penyusunan rancangan standar kompetensi teknis JPT Madya/Pratama dan Administrator;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan kode etik ASN;
- h. Pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berprestasi;
- i. Penerapan e-Office.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 326, maka capaian indeks sistem merit tahun 2021 sudah mencapai 88.9%. Dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah yang berkontribusi langsung mendukung pencapaian seluruh aspek penerapan sistem merit khususnya aspek pengembangan karir serta aspek promosi dan mutasi, BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada indikator kinerja indeks sistem merit sebesar 326.

Indikator Kinerja 3					
Indeks Reformasi Birokrasi					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	68	73	75	85	91
Capaian	70.92	74.57	76.54	78.88	-
% Capaian	109.1%	102.2%	102.1%	92.8	-
% Capaian dengan target jangka menengah					86.7

Data capaian diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20	15.02	14.30
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	6.88	6.31
	III. Reform	30	19.59	23.99
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>41.49</b>	<b>44.60</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8.17	8.21
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9.43	8.62
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	9.60	8.35
4.	Kinerja Organisasi	10	7.85	9.11
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>35.05</b>	<b>34.28</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100</b>	<b>76.54</b>	<b>78.88</b>

Peningkatan capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2021 yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi hasil evaluasi penilaian Kementerian PAN dan RB tahun 202, antara lain:

- a. Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- b. Melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional dan telah dilakukan pelantikan pada tanggal 28 Desember 2021;
- c. Perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja pegawai dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip pembagian pekerjaan secara berjenjang (cascading) dan indikator Renstra pada dokumen perjanjian kinerja. Target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja menjadi target kinerja pegawai dalam capaian SKP dan SKP menjadi komponen perhitungan penerimaan TPP pegawai;
- d. Mengoptimalkan perbaikan berkelanjutan sistem pengawasan dan pengendalian API sebagai Quality Assurance and Consulting. Perbaikan dan

pengembangan sistem pengawasan terpadu seperti :SIPADU, E-DUMAS, Cetak Gol, SIMANTUL, PERISAI dan Eklirik.

#### Indikator Kinerja 4

##### Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	N/A	N/A	100%	91%	91%
Capaian	N/A	N/A	89.5%	91.8	-
% Capaian	N/A	N/A	89.5%	100.8%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					100.8%

Target indikator kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran baru mulai diperhitungkan pada tahun 2020. Berdasarkan data evaluasi yang disajikan dalam tabel diatas, persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 91.8% atau setara 100.8% dari target yang ditetapkan sebesar 91%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa upaya sebagai berikut :

- komitmen pimpinan dan para pengampu/penanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan, sub kegiatan dan rincian sub kegiatan (RSK) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai target yang telah ditetapkan;
- dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh progress pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan dan rincian sub kegiatan (RSK) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 91, maka capaian indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 sudah mencapai 100.8%. Komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan dan rincian sub kegiatan (RSK) pada Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong BKD Provinsi DKI Jakarta untuk dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 91.

### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		% Efisiensi
			Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	
1.	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	0.90	12.801.555.320	10.704.975.442	5.79%
2.	Indeks Sistem Merit	1			
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	0.928			
4.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1.008	331.144.814.555	327.889.201.962	0.001%
Rata-rata					2.89%

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 2.89%.

## d. Perbandingan Capaian Nasional

### ❖ Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)

Bersumber dari dokumen Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2021 diperoleh informasi bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN BKN pada tahun 2021 sebesar 78.42, capaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian Pemprov. DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 80.74, dengan rincian sebagai berikut :

No	Dimensi	Capaian BKN	Capaian Pemprov. DKI
1.	Kualifikasi	15.31%	13.04%
2.	Kompetensi	31.11%	38.63%
3.	Kinerja	27.38%	24.08%
4.	Disiplin	4.9%	5%
<b>Total</b>		<b>78.42</b>	<b>80.74</b>

Sampai dengan laporan ini tersusun, Kementerian PAN dan RB belum mempublikasikan data capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 secara nasional, sehingga analisa perbandingan data dilakukan dengan membandingkan antara capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dengan target nasional tahun 2021 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2020, sebagai berikut :

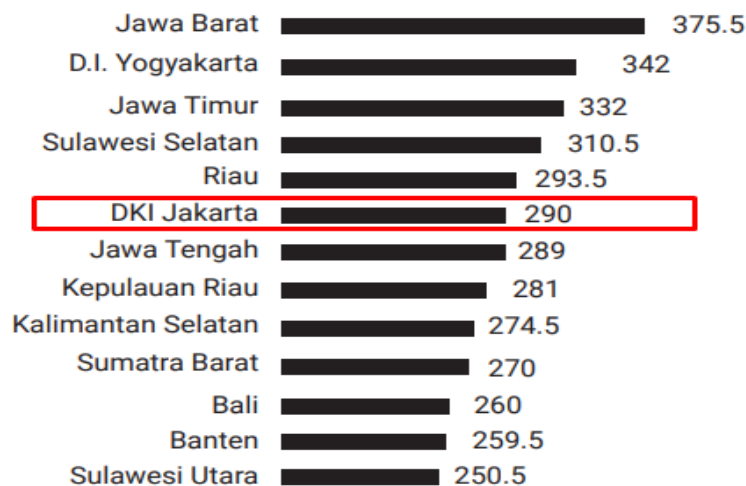
KEMENTERIAN/LEMBAGA : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>						
	<b>Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi</b>					
	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional	Skor 41 (Cukup Efektif)	Skor 45 (Cukup Efektif)	Skor 50 (Cukup Efektif)	Skor 56 (Cukup Efektif)	Skor 61 (Efektif)
	Indeks SPBE	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6
	% K/L/D yang mencapai predikat SPBE "Baik"	45 IP	90 IP	150 IP	257 IP	371 IP
	<b>Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera</b>					
	Indeks Sistem Merit ASN Nasional	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71	73	76	78	80

Berdasarkan data diatas, dapat diperoleh informasi bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 80.74 telah melebihi target nasional tahun 2021 yang hanya sebesar 73.

#### ❖ Indeks Sistem Merit

Bersumber dari dokumen Laporan Tahunan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun 2020 diperoleh informasi bahwa capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2020 sebesar 290 atau setara 0.70 menempatkan Pemprov. DKI Jakarta pada peringkat 6 (enam) dari 13 Provinsi yang dilakukan penilaian oleh KASN sebagai berikut :



Meskipun berada pada peringkat 6 (enam) dari 13 Provinsi, capaian Indeks Sistem Merit Pemprov. DKI Jakarta tahun 2020 yang sebesar 290 atau setara 0.70 telah terealisasi sesuai dengan target nasional yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2020, sebagai berikut:

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI						
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi					
	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional	Skor 41 (Cukup Efektif)	Skor 45 (Cukup Efektif)	Skor 50 (Cukup Efektif)	Skor 56 (Cukup Efektif)	Skor 61 (Efektif)
	Indeks SPBE	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6
	% K/L/D yang mencapai predikat SPBE "Baik"	45 IP	90 IP	150 IP	257 IP	371 IP
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera					
	Indeks Sistem Merit ASN Nasional	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71	73	76	78	80

❖ Indeks Reformasi Birokrasi

Apabila dibandingkan dengan data target nilai pelaksanaan RB Nasional yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2020, maka capaian nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 78.88 telah melebihi target akhir periode Renstra Kemenpan dan RB tahun 2024 yang hanya sebesar 71.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		2020	2024
Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	KL: 70; Prov: 65; Kab/Kota: 60	KL: 80; Prov: 71; Kab/Kota: 67

❖ Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tidak dapat dilakukan perbandingan antara capaian BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional maupun Pemerintahan Daerah lainnya untuk indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran karena data pembandingan tidak tersedia.

## 2. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, berikut ini dijabarkan data capaian indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021:

### a. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 1. Kualifikasi (bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- g. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- h. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- i. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- j. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- k. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
- l. Pendidikan di bawah SLTA.

#### 2. Kompetensi (bobot 40%)

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis;
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara

#### 3. Kinerja (bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :

- c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- d. Perilaku Kerja.

4. Disiplin (bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- d. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Dari 4 (empat) dimensi Indeks Profesionalitas ASN diatas, sebanyak 3 (tiga) dimensi diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Adapun untuk dimensi kompetensi diampu oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, berikut ini disajikan data target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021:

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	89.9	80.74	89.8%

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, sesuai surat Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 4.547/-078 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Usulan Revisi Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Tahun 2017-2022, BKD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan target pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sehingga pada tahun 2021 target dalam dokumen perubahan RPJMD dan Renstra berubah dari 89.9 menjadi 78. Namun, perubahan target dimaksud tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 sehingga target indikator kinerja utama (IKU) pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 masih tetap mengacu pada surat keputusan dimaksud sebesar 89.9.

Terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) tahun 2021 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 (dua) dimensi yang mengalami trend penurunan capaian di tahun 2021 yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kinerja. Penurunan capaian pada dimensi kualifikasi disebabkan karena pada tahun 2020 BKD Provinsi DKI Jakarta

tidak melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS sebagai tindak lanjut dari adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional sehingga pada periode kenaikan pangkat April tahun 2021 BKD Provinsi DKI Jakarta kehilangan potensi adanya peningkatan status pendidikan sebanyak  $\pm$  1.200 pegawai. Adapun penurunan capaian pada dimensi kinerja disebabkan karena adanya transisi pelaporan capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi tersistem melalui aplikasi SIMPEG ([pegawai.jakarta.go.id](http://pegawai.jakarta.go.id)) sehingga dari jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 sebanyak 58.643 orang tercatat sebanyak  $\pm$  9.000 pegawai belum melakukan penginputan nilai PPK tahun 2020.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 14 Sub Kegiatan dan 35 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.10.704.975.442,- atau setara 83.62% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 12.801.555.320,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Jumlah RSK	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Program Daerah Kepegawaian	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1	100%	92,63%
		2 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	100%	100,00%
		3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1	100%	100,00%
		4 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	100%	96,06%
		5 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	100%	62,58%
		6 Pengelolaan Mutasi ASN	1	100%	99,52%
		7 Pengelolaan Promosi ASN	3	100%	56,64%
		8 Pengelolaan Assessment Center	4	100%	95,89%
		9 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	100%	6,67%
		10 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6	100%	99,85%
		11 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	100%	99,20%
		12 Pengelolaan Data Kepegawaian	2	100%	99,00%
		13 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	100%	92,23%
		14 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	9	100%	93,14%

Selain didukung oleh pelaksanaan program, sub kegiatan dan rincian sub kegiatan (RSK), keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja sasaran juga tidak terlepas dari pencapaian beberapa rencana aksi KSD sebagai berikut :

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	% Capaian
<b>KSD 61 - Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan</b>						
1	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B06	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 25 nama jabatan. Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator	100%
2	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B09	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 40 nama jabatan.  Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator.	100%
3	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B12	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 135 nama jabatan.  Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator.	100%
4	Pola Pengembangan Karir	Tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi	Pola karier dan peta jabatan pimpinan tinggi	B12	1. Tersusunnya Update Rancangan peta jabatan pimpinan tinggi yang menjadi dasar dalam menentukan jalur karier jabatan; 2. Tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi.  Data Dukung: 1. Update Rancangan peta jabatan pimpinan tinggi yang menjadi dasar dalam menentukan jalur karier jabatan; 2. Peraturan Gubernur tentang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi.	100%
5	Penyusunan Talent Pool	Tersedianya tools untuk memetakan pejabat pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya atau sebagai bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi.	Tersedianya database profil potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan kompeten untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan surat keputusan yang berlaku.	B09	Penyusunan database profil kinerja dan kompetensi pegawai berdasarkan kuadran talent pool Data Dukung: Database profil kinerja dan kompetensi pegawai berdasarkan kuadran talent pool	100%

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	% Capaian
<b>KSD 68 - Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta</b>						
1	Sosialisasi Nilai-nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Tersosialisasikannya Nilai-Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Tersosialisasikannya Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja	B03	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 1	100%
				B06	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 2	100%
				B09	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 3	100%
				B12	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 4	100%
2	Penyusunan Program kerja agen perubahan	Tersusunnya Program kerja agen perubahan	Tersusunnya dokumen program kerja agen perubahan	B06	1. Program kerja agen perubahan 2. Materi agen perubahan budaya kerja	100%
3	Penyusunan Road Map Transformasi Budaya	Tersusunnya Road Map Transformasi Budaya Kerja	Tersusunnya Pergub Road Map Transformasi Budaya Kerja	B09	Kajian Road Map Transformasi Budaya Kerja	100%
				B12	Pergub/Kepgub terkait Road Map Transformasi Budaya	90%
4	Pelaksanaan agen perubahan sharing forum	Terjadinya knowledge sharing dalam sharing forum bagi agen perubahan	Terlaksananya sharing forum bagi agen perubahan	B12	Pelaksanaan sharing forum bagi agen perubahan	100%
5	Penyusunan Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Ditetapkannya Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	B12	Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	100%

### Sasaran Strategis 2

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Skor/ Indeks	90	90.96	101.07%

Survei Kepuasan Pelayanan yang dilaksanakan BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan dimaksud disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan ini terdiri dari 9 unsur yaitu :

- 1) **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3) **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- 4) **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- 7) **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- 8) **Penanganan pengaduan**, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 9) **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pada Tahun 2021, BKD melaksanakan survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara *online* melalui link : [https://bitly.com/layanan\\_kepegawaian](https://bitly.com/layanan_kepegawaian). Bahwa, dari total jumlah pegawai Pemprov. DKI Jakarta sebanyak 58.639 orang (sesuai listing gaji Desember 2021) tercatat sebanyak 44.067 orang (75.15%) dari seluruh Perangkat Daerah telah berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara online. Adapun rata-rata nilai pada setiap unsur pelayanan yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai IKM Per Unsur Pelayanan	Keterangan	
U1	Persyaratan	44067	3.570	A	Capaian Pada Tahun 2021 di dapat berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan kepegawaian dilakukan secara online melalui link : <a href="https://bitly.com/layanan_kepegawaian">https://bitly.com/layanan_kepegawaian</a> . dengan jumlah Responden sebanyak sebanyak 44.052 orang	
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	44067	3.5425075	A		
U3	Waktu Penyelesaian	44067	3.4930649	A		
U4	Biaya/Tarif	44067	3.8626365	A		
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	44067	3.5431659	A		
U6	Kompetensi Pelaksana	44067	3.5423259	A		
U7	Perilaku Pelaksana	44067	3.5571724	A		
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	44067	3.89099	A		
U9	Sarana dan Prasarana	44067	3.7438424	A		
<b>Nilai Capaian</b>					<b>90.96</b>	<b>Kualitas Mutu A Sangat Baik</b>
<b>Target Capaian</b>					<b>90.00</b>	
<b>Persentase Capaian</b>					<b>101.07%</b>	

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta sebesar 90.96 berada pada interval mutu pelayanan “A” dengan kategori kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 4 Sub Kegiatan dan 11 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 1.325.355.524,- atau setara 95.83% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.382.957.250,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Jumlah RSK	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	1 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6	100%	99.85%
		2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	100%	99.20%
		3 Pengelolaan Data Kepegawaian	2	100%	99.00%
		4 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	100%	92.23%

## b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah dalam RPJMD

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra :

Indikator Kinerja 1					
Indeks Profesionalitas ASN					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	89.95	89.96	89.97	89.99	90
Capaian	73.21	80.53	74.06	80.74	-
% Capaian	81.39%	89.52%	82.32%	89.81%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					89.71%

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN dari tahun 2021 mengalami peningkatan dari 74.06 menjadi 80.74. Selanjutnya, dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta upaya berkelanjutan dalam mengintegrasikan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan sistem informasi kediklatan (SIMDIKLAT) dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sebesar 90.

## Indikator Kinerja 2

## Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	78	81	86	90	93
Capaian	86.06	87.03	87.23	90.96	-
% Capaian	110.33%	107.44%	101.43%	101.07%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					97.81%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian tahun 2021 dapat tercapai sebesar 90.96 dari yang ditargetkan sebesar 90 atau setara 101.07%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan dalam mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :

- Sistem informasi penghargaan;
- Sistem informasi *talent pool*;
- Sistem informasi peta kompetensi;
- Sistem informasi jabatan fungsional;
- Sistem informasi e-Disiplin;
- Sistem informasi e-SKP.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 93, maka capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian tahun 2021 sudah mencapai 97.81%. Dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan yang dapat memudahkan proses administrasi kepegawaian, BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian sebesar 93.

### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		% Efisiensi
			Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	
1.	Indeks Profesionalitas ASN	0.8981	12.801.555.320	10.704.975.442	6.89%
2.	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	1.0107	1.382.957.250	1.325.355.524	5.18%
Rata-rata					6.03%

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar **6.03%**.

### d. Perbandingan Capaian Nasional

#### ❖ Indeks Profesionalitas ASN

Bersumber dari dokumen Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2021 diperoleh informasi bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN BKN pada tahun 2021 sebesar 78.42, capaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan

dengan capaian Pemprov. DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 80.74, dengan rincian sebagai berikut :

No	Dimensi	Capaian BKN	Capaian Pemprov. DKI
1.	Kualifikasi	15.31%	13.04%
2.	Kompetensi	31.11%	38.63%
3.	Kinerja	27.38%	24.08%
4.	Disiplin	4.9%	5%
<b>Total</b>		<b>78.42</b>	<b>80.74</b>

Selanjutnya bersumber dari dokumen Laporan Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2020, diperoleh informasi bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN Nasional sebesar 63.83, sehingga capaian Pemprov. DKI Jakarta pada Tahun 2021 juga telah berada diatas rata-rata capaian Nasional, sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional	Cukup Efektif	Efektif	133%
2	Jumlah K/L/D yang mencapai predikat SPBE "Baik"	217 IP	247	113,82%
3	Indeks SPBE Nasional	2.1	2,9	138,10%
<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera				
1	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71	63.83	89.90%
2	Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional	0,7	0,53	75,71%

Sedangkan untuk capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 secara nasional sampai dengan laporan ini tersusun belum dipublikasikan oleh Kementerian PAN dan RB.

#### ❖ Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian

Tidak dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap seluruh capaian indikator kinerja indeks kepuasan layanan kepegawaian dengan capaian Nasional maupun Pemerintahan Daerah lainnya karena ketidakterdediaan data pembanding.

### 3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya dituangkan ke dalam program dan indikator kinerja yang pencapaiannya dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur				
Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	Nilai	88	88.91	101.03%

Indikator kinerja indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PPK). Adapun nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :

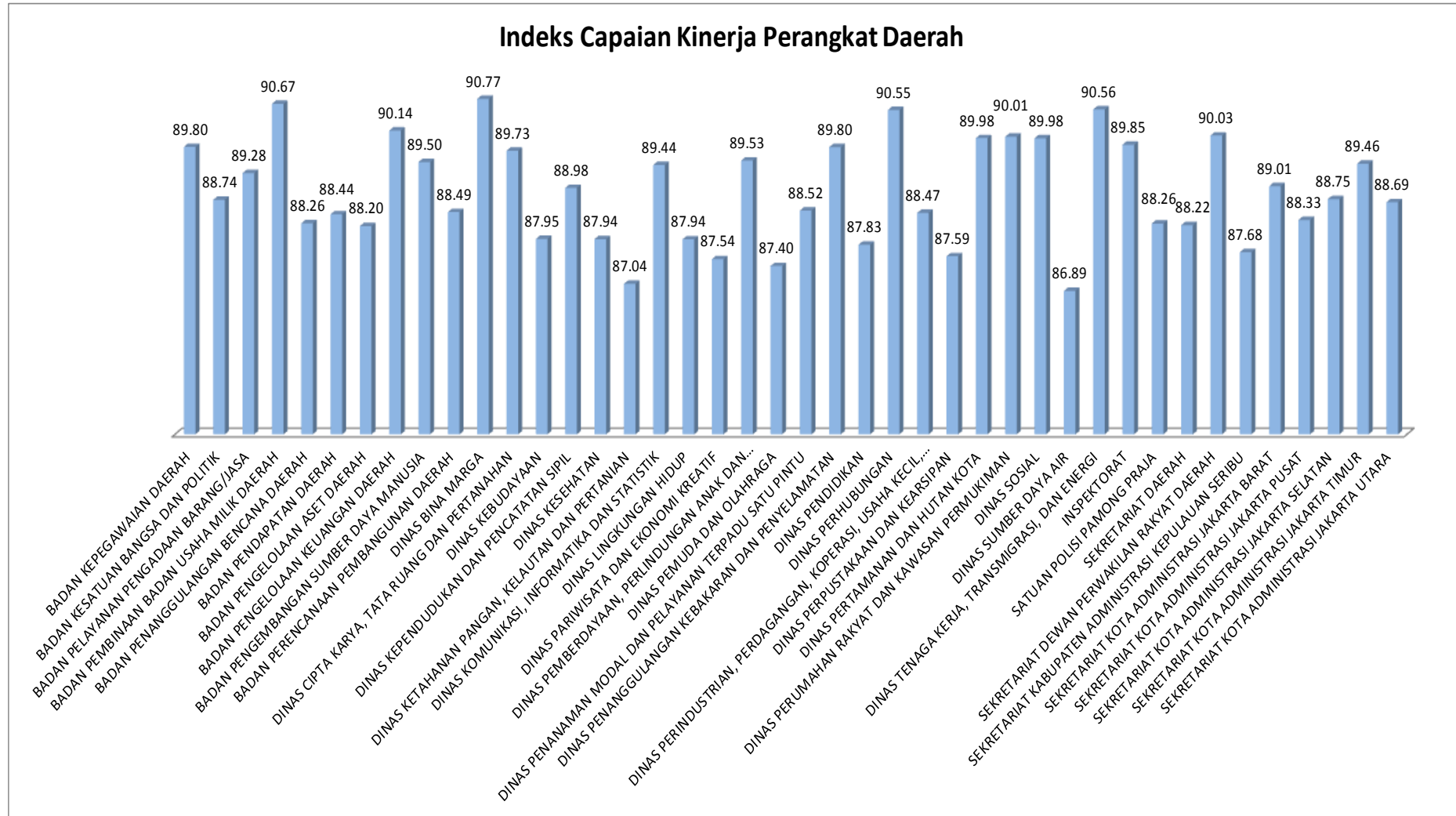
- a. 91 - ke atas : Sangat Baik
- b. 76-90 : Baik
- c. 61-75 : Cukup
- d. 51-60 : Kurang
- e. 50 ke bawah : Buruk

Perhitungan indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta dilakukan dengan cara menggabungkan (rata-rata) antara unsur penilaian **SKP** dan unsur penilaian **Perilaku Kerja** yang dilaksanakan oleh Pejabat Penilai pada tahun

sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi capaian, dari jumlah pegawai sesuai listing gaji Januari 2022 sebanyak 53.630 orang di 42 Perangkat Daerah diperoleh nilai rata-rata indeks capaian kinerja sebesar 88.91 melebihi target yang ditetapkan sebesar 88 (101.03%). Pencapaian dimaksud didukung melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 4 Sub Kegiatan dan 11 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 420.314.000,- atau setara 95.45% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 440.345.400,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut:

Program	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Capaian Output	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
Program Kepegawaian Daerah	<b>Total</b>			<b>440.345.400</b>	<b>420.314.000</b>	<b>95,45%</b>	
	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengembangan Budaya Kerja Pegawai	100%	271.745.400	251.714.000	92,63%
	2	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Kinerja Terintegrasi	100%	72.600.000	72.600.000	100,00%
	3	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	96.000.000	96.000.000	100,00%

Selanjutnya dijabarkan pula data realisasi indeks capaian kinerja ASN Perangkat Daerah tahun 2021 sebagai berikut :



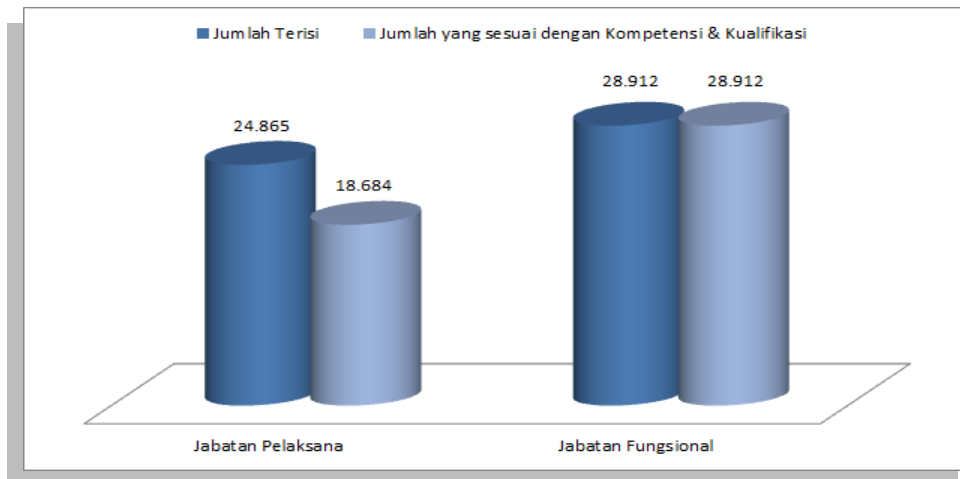
## Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

Indikator Kinerja 2	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	%	80%	81.17%	101.46%

Indikator kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian (kompetensi dan kualifikasi) jabatan pelaksana dan jabatan fungsional (JF) yang terisi dibandingkan dengan seluruh jumlah formasi jabatan yang ada. Seluruh pejabat pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui SK penempatan jabatan pelaksana berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim yang dinilai dari kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki PNS dengan syarat kompetensi dan kualifikasi dalam Analisa Jabatan telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan RB serta mempedomani Pergub Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa pengangkatan pejabat fungsional dapat dikategorikan telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dipersyaratkan apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Hasil evaluasi capaian menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai sesuai listing gaji Desember 2021 sebanyak 58.639 orang, sebanyak 47.596 orang (81.17%) telah mengisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sehingga target indikator kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi tahun 2021 dapat terealisasi 101.46%, dengan rincian sebagai berikut :



Pencapaian pada indikator dimaksud didukung melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 6 Sub Kegiatan dan 12 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 5.714.859.800,- atau setara 76.25% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 7.494.715.560,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut:

Program	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Capaian Output	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
Program Kepegawaian Daerah	<b>Total</b>			<b>7.494.715.560</b>	<b>5.714.859.800</b>	<b>76,25%</b>	
	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Kajian Kebijakan Pengelolaan Tenaga Non PNS	791.550.000	759.450.000	95,94%	
			Penyusunan, Pengembangan dan Pengisian Formasi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	22.200.000	22.200.000	100,00%	
	2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rekrutmen CPNS dan PPPK Provinsi DKI Jakarta	3.281.168.960	2.053.263.200	62,58%	
	3	Pengelolaan Mutasi ASN	Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD	41.750.000	41.550.000	99,52%	
	4	Pengelolaan Promosi ASN	Seleksi Terbuka Jabatan	100%	655.200.000	319.200.000	48,72%
			Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management	100%	148.800.000	99.900.000	67,14%
			Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural	100%	86.400.000	85.200.000	98,61%
	5	Pengelolaan Assessment Center	Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	1.654.759.800	1.556.859.800	94,08%
			Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	397.536.800	395.486.800	99,48%
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai	100%	297.450.000	297.450.000	100,00%
			Pengembangan Alat ukur Psikologi	100%	81.900.000	81.900.000	100,00%
	6	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	36.000.000	2.400.000	6,67%

### Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

Indikator Kinerja 3	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	%	11%	14.29%	129.87%

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Di dalam peraturan tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BKD Provinsi DKI Jakarta memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang merupakan kewenangan pejabat eselon I, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Gubernur.

Capaian indikator persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD diperoleh dengan cara menghitung trend jumlah kasus pelanggaran disiplin kewenangan Sekda dan Gubernur yang

diproses oleh BKD pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, BKD Provinsi DKI Jakarta menargetkan Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sebesar 11% (lima persen) dengan tingkat realisasi sebesar 14.29% atau setara 129.87%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Keputusan Hukuman Disiplin pada Tahun		Jumlah Perubahan	% Perubahan	Keterangan
		2020	2021			
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = (5/3) * 100%	7
1	Ringan	0	3	-3	-	Peningkatan
2	Sedang	5	8	-3	-60,00	Peningkatan
3	Berat	23	13	10	43,48	Penurunan
Nilai Capaian		28	24	4	14,29	Penurunan
Target Capaian					11,00	
Persentase Capaian					129,87%	

Pencapaian pada indikator dimaksud didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam 1 Sub Kegiatan dan 1 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 28.800.000,- atau setara 100% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 28.800.000,- dengan tingkat capaian output 100% sebagai berikut:

Program	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Capaian Output	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<b>Total</b>			<b>28.800.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>100%</b>
	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan dan Peningkatan Pemahaman terhadap Peraturan Kepegawaian	100%	28.800.000	28.800.000

### Sasaran Strategis 2

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Nilai	90	90,96	101,07

Survei Kepuasan Pelayanan yang dilaksanakan BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan dimaksud disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan ini terdiri dari 9 unsur yaitu :

- 1) **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3) **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- 4) **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- 7) **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- 8) **Penanganan pengaduan**, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 9) **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pada Tahun 2021, BKD melaksanakan survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara *online* melalui link : [https://bitly.com/layanan\\_kepegawaian](https://bitly.com/layanan_kepegawaian). Bahwa, dari total jumlah pegawai Pemprov. DKI Jakarta sebanyak 58.639 orang (sesuai listing gaji Desember 2021) tercatat sebanyak 44.067 orang (75.15%) dari seluruh Perangkat Daerah telah berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara online. Adapun rata-rata nilai pada setiap unsur pelayanan yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai IKM Per Unsur Pelayanan	Keterangan	
U1	Persyaratan	44067	3.570	A	Capaian Pada Tahun 2021 di dapat berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan kepegawaian dilakukan secara online melalui link : <a href="https://bitly.com/layanan_kepegawaian">https://bitly.com/layanan_kepegawaian</a> . dengan jumlah Responden sebanyak sebanyak 44.052 orang	
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	44067	3.5425075	A		
U3	Waktu Penyelesaian	44067	3.4930649	A		
U4	Biaya/Tarif	44067	3.8626365	A		
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	44067	3.5431659	A		
U6	Kompetensi Pelaksana	44067	3.5423259	A		
U7	Perilaku Pelaksana	44067	3.5571724	A		
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	44067	3.89099	A		
U9	Sarana dan Prasarana	44067	3.7438424	A		
<b>Nilai Capaian</b>					<b>90.96</b>	<b>Kualitas Mutu A Sangat Baik</b>
<b>Target Capaian</b>					<b>90.00</b>	
<b>Persentase Capaian</b>					<b>101.07%</b>	

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta sebesar 90.96 berada pada interval mutu pelayanan “A” dengan kategori kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 4 Sub Kegiatan dan 11 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 1.325.355.524,- atau setara 95.83% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.382.957.250,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Jumlah RSK	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	1 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6	100%	99.85%
		2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	100%	99.20%
		3 Pengelolaan Data Kepegawaian	2	100%	99.00%
		4 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	100%	92.23%

### Sasaran Strategis 2

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Indikator Kinerja 2	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan KORPRI	Nilai	90	93.26	103.62%

Sebagaimana survei yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pelayanan kepegawaian, survei kepuasan layanan KORPRI juga dilaksanakan secara *online* melalui link : <https://forms.gle/sYaPvqMYw9epzzQh6> dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Bahwa, dari total responden sebanyak 6.994 orang diperoleh nilai indeks sebesar 93.26 dengan interval mutu pelayanan “A” berada pada kategori kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Unsur per Pelayanan		Nilai IKM Per Unsur Pelayanan	Keterangan
U1	Persyaratan	6994	3,64	A	10,12	Capaian pada Tahun 2021 didapat berdasarkan hasil survey kepuasan pelayanan KORPRI Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara online melalui link : <a href="https://forms.gle/sYaPvqMYw9epzzQh6">https://forms.gle/sYaPvqMYw9epzzQh6</a> dengan jumlah responden sebanyak 6994 orang
U2	Mekanisme	6994	3,64	A	10,12	
U3	Waktu Pelayanan	6994	3,71	A	10,31	
U4	Biaya	6994	3,93	A	10,91	
U5	Produk Layanan	6994	3,87	A	10,75	
U6	Kompetensi Pelayanan	6994	3,77	A	10,47	
U7	Perilaku Pelayanan	6994	3,84	A	10,67	
U8	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	6994	3,57	A	9,91	
U9	Sarana dan Prasarana	6994	3,60	A	10,00	
<b>Nilai Capaian</b>					<b>93,26</b>	<b>Mutu Pelayanan A Sangat Baik</b>
<b>Target Capaian</b>					<b>90,00</b>	
<b>Persentase Capaian</b>					<b>103,62%</b>	

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan KORPRI, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 1 Sub Kegiatan dan 9 Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 3.244.446.118,- atau setara 93.14%

dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.483.537.110,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

Program	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Capaian Output	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Program Kepegawaian Daerah	1 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	<b>Total</b>		<b>3.483.537.110</b>	<b>3.244.446.118</b>	<b>93,14%</b>
		Proposal Program Kegiatan Yayasan KORPRI DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 (Hibah uang untuk YAYASAN KORPRI DKI JAKARTA)	100%	284.038.720	224.747.720	79,13%
		Permohonan Dana Hibah Tahun 2021 (Hibah uang untuk Badan Cendana Bakti Jaya)	100%	1.726.420.000	1.645.124.398	95,29%
		Proposal Usulan Anggaran Bantuan Hibah Atas APBD Tahun 2021 Perkumpulan Werdatama Jaya Provinsi DKI Jakarta (Hibah uang untuk Paguyuban Werdatama Jaya)	100%	648.428.000	598.428.000	92,29%
		Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur	100%	67.200.000	67.200.000	100,00%
		Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta	100%	16.109.040	15.761.000	97,84%
		Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta	100%	4.440.000	3.500.000	78,83%
		Penyelenggaraan Wawasan Keaqamaan Islam	100%	257.400.000	257.400.000	100,00%
		Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	100%	15.101.350	13.585.000	89,96%
		Penyelenggaraan Peribadatan Keaqamaan	100%	464.400.000	418.700.000	90,16%

### b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah dalam RPJMD

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja program tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra :

Indikator Kinerja 1					
Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	82	84	86	88	90
Capaian	83	86.22	84.84	88.91	-
% Capaian	101.22%	102.64%	98.65%	101.03%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					98.78%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta tahun 2021 dapat tercapai sebesar 88.91 dari yang ditargetkan sebesar 88 atau setara 101.03%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari ditetapkan beberapa kebijakan antara lain :

- a. Instruksi Gubernur No. 9 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021;
- b. Surat Edaran Gubernur No. 12/SE/2021 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Periode I dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Periode II Tahun 2021;
- c. Surat Edaran Ka. BKD No. 38/SE/ 2021 tentang Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021;
- d. Surat Edaran Ka. BKD No. 54/SE/2021 tentang Optimalisasi Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2021.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90, maka realisasi Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta tahun 2021 sudah mencapai 98.78%. Dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah serta pengembangan sistem informasi SKP secara berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada indikator kinerja Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta sebesar 90.

Indikator Kinerja 2					
Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	55%	70%	75%	80%	85%
Capaian	68%	75.29%	81.74%	81.17%	-
% Capaian	123.64%	107.56%	108.99%	101.46%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					95.49%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai capaian pada indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi tahun 2021 dapat tercapai sebesar 81.17% dari yang ditargetkan sebesar 80% atau setara 101.46%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Verifikasi dan validasi usulan penempatan/pengangkatan jabatan pelaksana Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dengan mempedomani Pergub Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana;
- b. Pembinaan terhadap pemangku jabatan fungsional di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;
- c. Pemutakhiran data potret kompetensi ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi pegawai secara berkala;

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 85, maka realisasi indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi sudah mencapai 95.49%. Dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah serta penyempurnaan yang dibarengi implementasi kebijakan manajemen talenta dan pola karir ASN di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta, BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada indikator kinerja Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi sebesar 85.

Indikator Kinerja 3					
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	5%	7%	9%	11%	13%
Capaian	8%	30.35%	80%	14.29%	-
% Capaian	160%	433.55%	888.89%	129.87%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					109.92%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai capaian pada indikator Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD tahun 2021 dapat tercapai sebesar 14.29% dari yang ditargetkan sebesar 11% atau setara 129.87%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring kehadiran pegawai melalui e-absensi secara daring (on-line);
- b. Monitoring dan evaluasi disiplin pegawai dalam bentuk inspeksi mendadak secara langsung ke SKPD/UKPD;
- c. Bimbingan teknis pembinaan disiplin pegawai secara berkala;
- d. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain upaya-upaya diatas, faktor pendorong utama terealisasinya indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kesadaran PNS terhadap disiplin pegawai karena penerapan *reward and punishment* melalui kebijakan pemberian TKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2019. Adapun kebijakan dimaksud mengatur terkait pemberian TKD bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, yaitu tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
  - 1) teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan;
  - 2) teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan; dan
  - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan.
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa :
  - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan.
  - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 18 (delapan belas) bulan.
- c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa :

- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan
- 3) pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 13%, maka realisasi indikator persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sudah mencapai 109.92%. Dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah serta konsistensi dalam menerapkan upaya-upaya yang telah dianggap berhasil dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target indikator, BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada indikator kinerja persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sebesar 13%.

Indikator Kinerja 4					
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	78	81	86	90	93
Capaian	86.06	87.03	87.23	90.96	-
% Capaian	110.33%	107.44%	101.43%	101.07%	-
% Capaian dengan target jangka menengah					97.81%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian tahun 2021 dapat tercapai sebesar 90.96 dari yang ditargetkan sebesar 90 atau setara 101.07%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan dalam mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :

- a. Sistem informasi penghargaan;
- b. Sistem informasi *talent pool*;
- c. Sistem informasi peta kompetensi;
- d. Sistem informasi jabatan fungsional;
- e. Sistem informasi e-Disiplin;
- f. Sistem informasi e-SKP.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 93, maka capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian tahun 2021 sudah mencapai 97.81%. Dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan yang dapat memudahkan proses administrasi kepegawaian, BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian sebesar 93.

### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada

capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		% Efisiensi
			Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	
1.	Indeks Capaian Kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	1,0002	440.345.400	420.314.000	4,57%
2.	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	1,0146	7.494.715.560	5.714.859.800	24,85%
3.	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	1,2987	28.800.000	28.800.000	23,00%
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	1,0107	1.382.957.250	1.325.355.524	5,18%
5.	Indeks Kepuasan Layanan KORPRI	1,0362	3.483.537.110	3.244.446.118	10,12%
<b>Rata-rata</b>					<b>13.54%</b>

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta terhadap capaian indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebesar 5.18%.

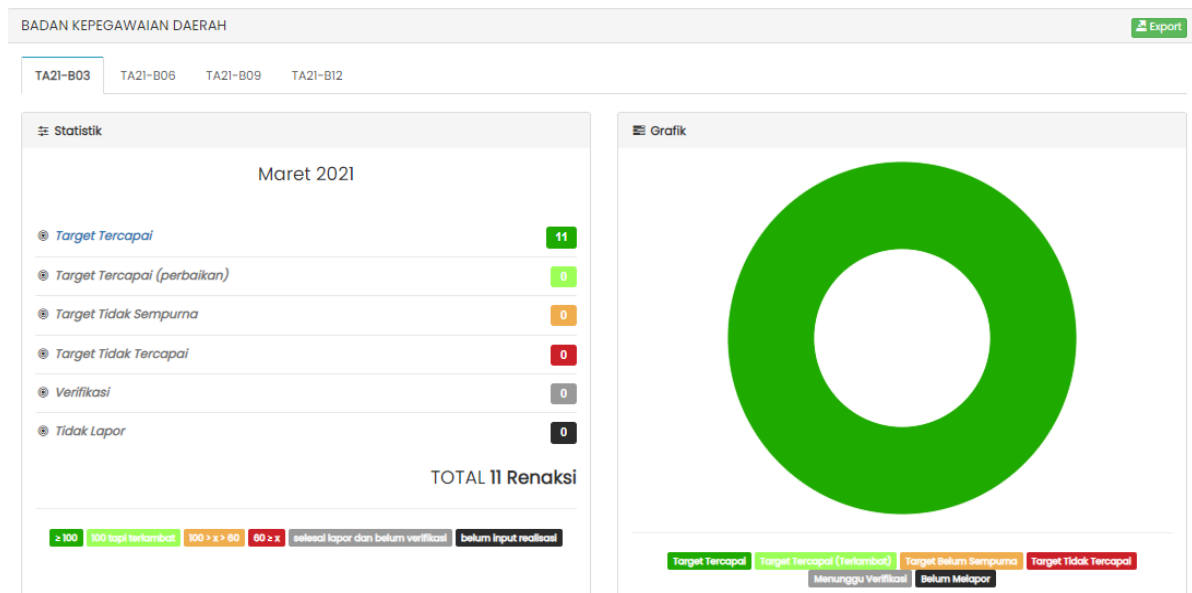
#### d. Perbandingan Capaian Nasional

Tidak dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap seluruh capaian indikator kinerja program BKD Provinsi DKI Jakarta dengan capaian Nasional maupun Pemerintahan Daerah lainnya karena ketidaktersediaan data pembandingan.

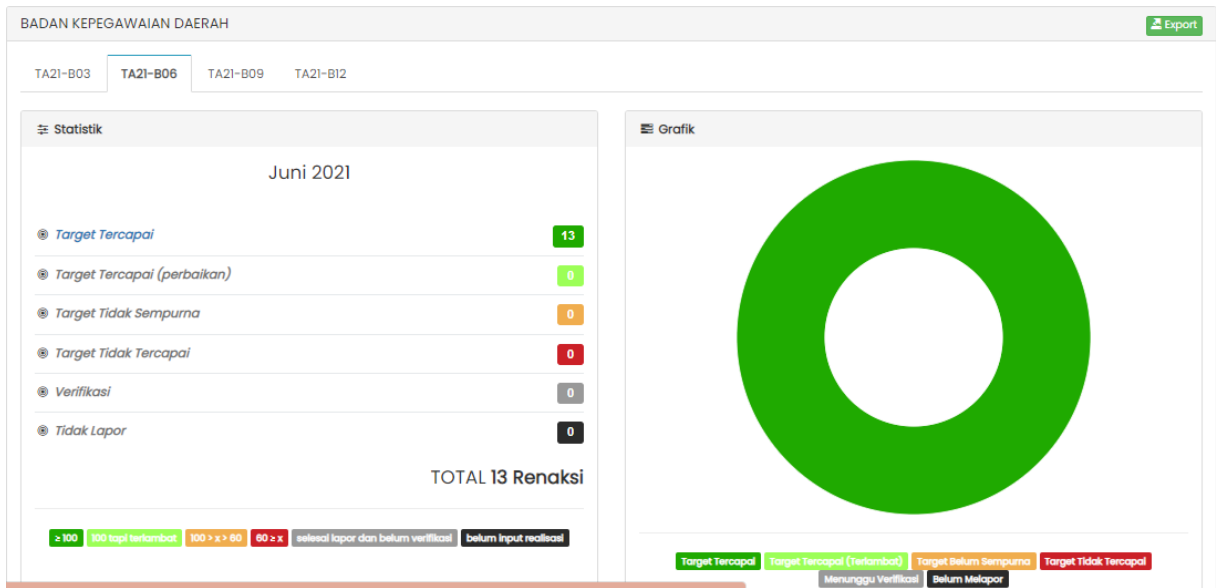
#### 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), pada tahun 2021 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan strategis daerah (KSD) dengan 53 (lima puluh tiga) rencana aksi yang secara umum rata-rata capainnya sebesar 99.62%. Berikut ini ditampilkan grafik pencapaian rencana aksi KSD secara triwulanan :

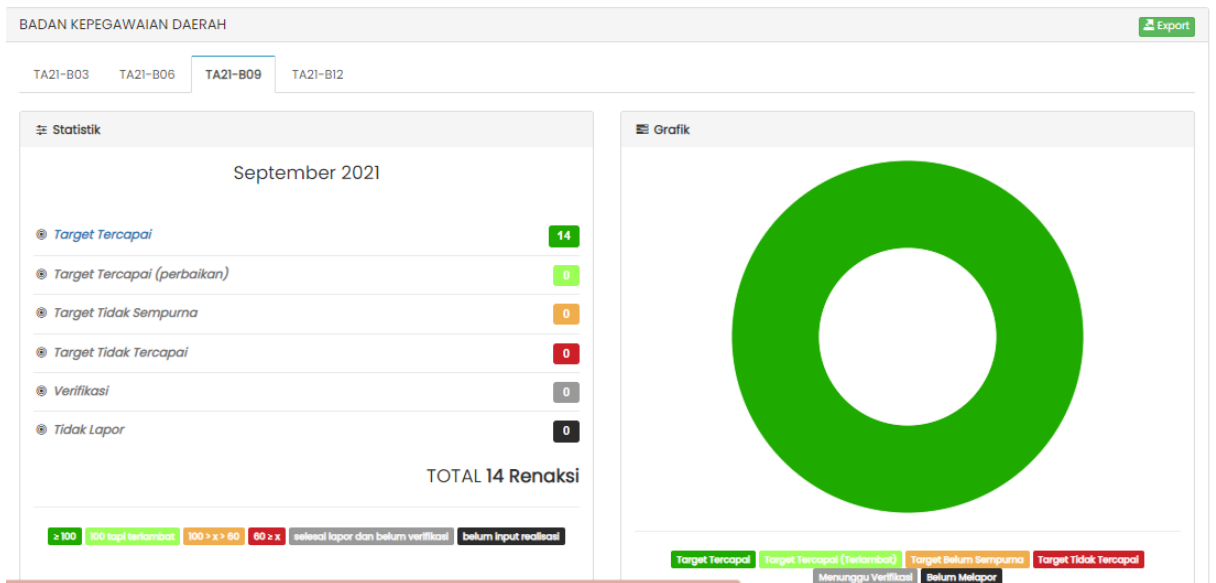
##### Triwulan I



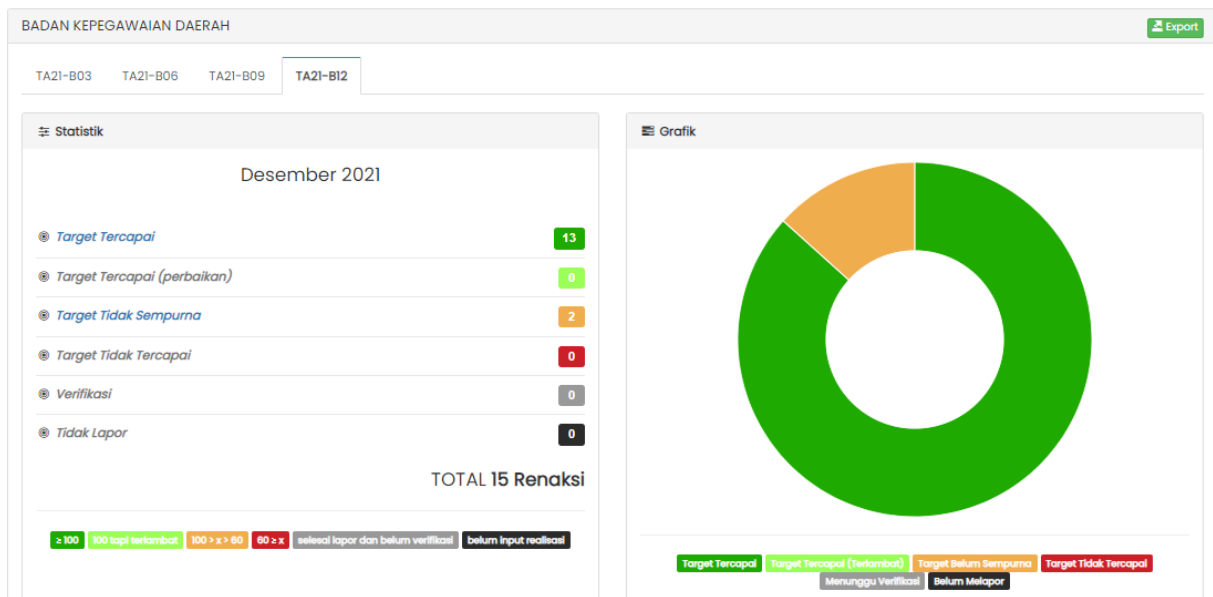
### Triwulan II



### Triwulan III



Triwulan IV



Dari hasil evaluasi sebagaimana ditampilkan dalam grafik-grafik diatas, diperoleh informasi bahwa seluruh target rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) yang ditetapkan pada triwulan I sampai dengan III dapat tercapai seluruhnya. Sementara pada triwulan IV terdapat 2 (dua) target rencana aksi yang tidak tercapai secara sempurna sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN KSD	NAMA RENAksi KSD	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN SAAT INI	KENDALA YANG DIHADAPI
1	Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN (KSD 62)	Penyusunan Satuan Biaya Upah Tenaga Non ASN pada Masing-masing Perangkat Daerah	Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Upah PJLP	1. Telah tersusunya rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Upah PJLP; 2. Telah tersusunya rancangan standar biaya upah/koefisien PJLP (Skilled maupun unskilled) dengan menggunakan metodologi factor evaluation system (FES).	1. Adanya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam perhitungan standar biaya upah/koefisien antara BKD dengan Biro ORB. 2. Biro ORB melaksanakan perhitungan standar biaya upah/koefisien (skilled) menggunakan metode FES melalui pendekatan 9 faktor dengan tidak menggunakan koefisien upah berdasarkan UMP. 3. BKD melaksanakan perhitungan standar biaya upah/koefisien (skilled) menggunakan metode FES melalui pendekatan 5 faktor serta masih menggunakan koefisien upah berdasarkan UMP.
2	Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta (KSD 68)	Penyusunan Road Map Transformasi Budaya	Pergub/Kepgub terkait Road Map Transformasi Budaya	1. Telah tersusunya kajian Road Map Transformasi Budaya; 2. Telah tersusunya rancangan Keputusan Gubernur tentang Road Map Transformasi Budaya	Terdapat perbedaan tata nilai budaya kerja yang ditetapkan Pemprov. DKI Jakarta melalui Pergub No. 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dengan dengan <i>core values</i> ASN yang di deklarasikan oleh Presiden pada tanggal 27 Juli 2021 sehingga finalisasi Keputusan Gubernur tentang Road Map Transformasi Budaya menunggu kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB.

Adapun data rekapitulasi capaian rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) tahun 2021 secara rinci disajikan dalam lampiran 5 (lima).

## 5. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

Berikut ini disajikan informasi capaian indikator kinerja sasaran khusus dan operasional Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
<b>Sasaran Khusus</b>				
1	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Cakupan survei kepuasan pelayanan kepegawaian	75%	75,15%
2	Terlaksananya Implementasi nilai-nilai budaya kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai budaya kerja	80%	115,67%
3	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	3
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	81%	90,31%
<b>Sasaran Operasional</b>				
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%

## 6. Penghargaan dan Prestasi

Berikut ini disajikan informasi beberapa penghargaan dan prestasi yang diperoleh BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021:

### a. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN berkategori “BAIK”

Berdasarkan Perka KASN No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah terdapat delapan aspek penilaian sistem merit yaitu Perencanaan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian Penghargaan & Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi. Dalam SK KASN Nomor 23/KEP.KASN/C/IX/2020 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan pada Kategori III (Baik) dengan Nilai 290 (dua ratus sembilan puluh) dan Indeks 0,70 ( nol koma tujuh puluh).



- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dikecualikan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA.23/PMPM/KASN/VIII/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020, perlu menetapkan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**KESATU** : Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan Nilai 290 (dua ratus sembilan ) dan Indeks 0,70 ( nol koma tujuh puluh).

**KEDUA** : Berdasarkan pada Diktum KESATU di atas, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kebutuhan

Menyempurnakan modul pengelolaan database pegawai yang akan memasuki BUP di dalam sistem informasi kepegawaian agar dapat menyajikan data jangka menengah (5 tahun ke depan).

#### b. Pengadaan

Mengevaluasi pelaksanaan Latsar CPNS untuk mengukur dampaknya terhadap perkembangan pengetahuan, kompetensi, dan perilaku para peserta Latsar CPNS.

#### c. Pengembangan Karir

- 1) Menyusun draf Kamus Kompetensi Teknis untuk Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana, serta menyelesaikan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT Madya, JPT Pratama, dan Jabatan Administrator hingga ke tahap penetapan;
- 2) Meningkatkan jumlah pegawai yang telah dilakukan *assessment* dan memetakan profil kompetensinya;
- 3) Melanjutkan pembangunan *talent pool* dan rencana sukses disertai dengan konsep dan dasar hukum yang komprehensif tentang manajemen talenta;
- 4) Melaksanakan analisis kesenjangan kompetensi teknis;
- 5) Melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi;
- 6) Memperluas analisis kesenjangan kinerja hingga ke level pelaksana dan fungsional, serta mengoptimalkan pengisian kolom faktor penghambat dan faktor pendukung dalam aplikasi e-SAKIP;
- 7) Menggunakan hasil analisis kesenjangan kompetensi

b. Sertifikasi BKN RI tentang Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/BKN/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 dinyatakan bahwa UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi kesesuaian Standar Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan **Kategori A** yang berlaku mulai 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026. Dengan kategori A tersebut UPT PPKP BKD Provinsi Jakarta diberi kepercayaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi paling tinggi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan fungsional setara.



c. BKN AWARD 2021

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggulirkan ajang BKN Award 2021 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik dari penilaian indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi : Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan ASN, Pengangkatan ASN, Pangkat, Jabatan, Pola Karir, Pengembangan Karir ASN,

Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian tunjangan dan fasilitas, Penghargaan, Disiplin, Cuti, Kode Etik, Pemberhentian, Jaminan Pensiun dan Hari Tua, Pensiun, dan Perlindungan. Berdasarkan unsur penilaian Indeks NSPK Manajemen tersebut, BKN menetapkan 5 (lima) kategori penilaian BKN Award 2021, yakni :

1. Perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepengkatan dan pensiun
2. Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT
3. Penilaian kompetensi
4. Implementasi Penilaian Kinerja
5. Komitmen pengawasan dan pengendalian



d. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberikan Anugerah Kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai **Badan Publik Terbaik** dalam ajang **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik** untuk Kategori Badan dalam Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021



e. Anugerah Penerapan (IM-NKK)

Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan Anugerah Kepada “**Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**” atas partisipasinya dalam **Pilot Project Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK)** dengan Kategori “**TINGGI**”



## 7. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berikut ini disajikan informasi komposisi Perubahan APBD BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 :

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
<b>Total Belanja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021</b>				<b>343.946.369.875</b>	<b>338.594.177.404</b>	<b>98,44%</b>	
1	Program Kepegawaian Daerah	<b>Total Belanja Program Kepegawaian Daerah</b>		<b>12.801.555.320</b>	<b>10.704.975.442</b>	<b>83,62%</b>	
		<b>Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta</b>		<b>440.345.400</b>	<b>420.314.000</b>	<b>95,45%</b>	
		1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengembangan Budaya Kerja Pegawai	271.745.400	251.714.000	92,63%
		2	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Kinerja Terintegrasi	72.600.000	72.600.000	100,00%
		3	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	96.000.000	96.000.000	100,00%
		<b>Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi</b>		<b>7.494.715.560</b>	<b>5.714.859.800</b>	<b>76,25%</b>	
		1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Kajian Kebijakan Pengelolaan Tenaga Non PNS	791.550.000	759.450.000	95,94%
				Penyusunan, Pengembangan dan Pengisian Formasi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	22.200.000	22.200.000	100,00%
		2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rekrutmen CPNS dan PPPK Provinsi DKI Jakarta	3.281.168.960	2.053.263.200	62,58%
		3	Pengelolaan Mutasi ASN	Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD	41.750.000	41.550.000	99,52%

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%		
		4	Pengelolaan Promosi ASN	Seleksi Terbuka Jabatan	655.200.000	319.200.000	48,72%	
				Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management	148.800.000	99.900.000	67,14%	
				Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural	86.400.000	85.200.000	98,61%	
		5	Pengelolaan Assessment Center	Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1.654.759.800	1.556.859.800	94,08%	
				Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	397.536.800	395.486.800	99,48%	
				Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai	297.450.000	297.450.000	100,00%	
				Pengembangan Alat ukur Psikologi	81.900.000	81.900.000	100,00%	
		6	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	36.000.000	2.400.000	6,67%	
		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian</b>				<b>1.382.957.250</b>	<b>1.325.355.524</b>	<b>95,83%</b>
		1	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pelayanan pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	202.500.000	202.100.000	99,80%	
Pelayanan pensiun Terpadu PNS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	13.200.000			13.200.000	100,00%			

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
			Pelayanan Pensiun Terpadu PNS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	13.200.000	13.200.000	100,00%	
			Pelayanan Pensiun Terpadu PNS Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	13.200.000	13.200.000	100,00%	
			Pelayanan pensiun Terpadu PNS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	13.200.000	13.200.000	100,00%	
			Pelayanan pensiun Terpadu PNS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	13.200.000	13.200.000	100,00%	
		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	276.000.000	273.800.000	99,20%
		3	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan dan Penataan Arsip Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	89.803.350	88.841.169	98,93%
				Digitalisasi dokumen data pegawai Provinsi DKI Jakarta	59.868.900	59.334.355	99,11%
		4	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS	528.285.000	474.780.000	89,87%
				Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta	160.500.000	160.500.000	100,00%

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		<b>Indeks Kepuasan Korpri</b>		<b>3.483.537.110</b>	<b>3.244.446.118</b>	<b>93,14%</b>
1	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Proposal Program Kegiatan Yayasan KORPRI DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 (Hibah uang untuk YAYASAN KORPRI DKI JAKARTA)	284.038.720	224.747.720	79,13%	
		Permohonan Dana Hibah Tahun 2021 (Hibah uang untuk Badan Cendana Bakti Jaya)	1.726.420.000	1.645.124.398	95,29%	
		Proposal Usulan Anggaran Bantuan Hibah Atas APBD Tahun 2021 Perkumpulan Werdatama Jaya Provinsi DKI Jakarta (Hibah uang untuk Paguyuban Werdatama Jaya)	648.428.000	598.428.000	92,29%	
		Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur	67.200.000	67.200.000	100,00%	
		Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta	16.109.040	15.761.000	97,84%	
		Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4.440.000	3.500.000	78,83%	
		Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam	257.400.000	257.400.000	100,00%	
		Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	15.101.350	13.585.000	89,96%	
		Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan	464.400.000	418.700.000	90,16%	

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<b>Total Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>331.144.814.555</b>	<b>327.889.201.962</b>	<b>99,02%</b>	
		<b>Indeks kepuasan pelayanan kantor</b>		<b>330.985.632.887</b>	<b>327.783.782.672</b>	<b>99,03%</b>	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	328.537.756.922	325.553.017.163	99,09%
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.163.940	11.085.400	91,13%
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.045.000	4.310.000	85,43%
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	283.800	-	0,00%
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	474.100	431.000	90,91%
		3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	523.105.529	454.616.910	86,91%
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.179.953	95.063.210	99,88%
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.226.432	27.154.589	74,96%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.045.221			28.680.850	98,75%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.466.249			43.465.400	100,00%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.583.855			24.682.900	96,48%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.780.027			23.550.428	79,08%		

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.775.000	60.157.900	98,98%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.725.635	22.855.000	92,43%
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	268.917.000	198.640.750	73,87%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.699.750	15.466.000	98,51%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.172.880	6.844.200	95,42%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.981.550	2.975.500	99,80%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.228.830	3.228.830	100,00%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.319.670	1.100.000	83,35%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.129.738	7.128.748	99,99%
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.368.510	4.357.300	99,74%
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.800.000	28.800.000	100,00%
		7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.846.400	149.846.400	100,00%
			Penyediaan sewa mesin fotokopi	224.769.600	198.000.000	88,09%

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Penyediaan sewa mesin fotokopi	21.852.600	15.153.600	69,34%
			Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	37.435.200	99,93%
			Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	28.380.000	75,76%
			Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	36.960.000	98,66%
			Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	37.461.600	100,00%
		8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	62.778.067	61.958.600	98,69%
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	35.609.244	35.244.000	98,97%
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	6.102.151	4.222.500	69,20%
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	3.684.153	3.635.500	98,68%
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	1.750.804	1.545.000	88,25%
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	8.378.810	8.378.810	100,00%
		9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33.115.170	30.960.600	93,49%
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	429.792	390.000	90,74%
			Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	1.576.300	1.400.000	88,82%
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.905.749	2.905.749	100,00%
		10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.624.250	18.370.000	81,20%

No	Program	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran - APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	497.133.806	493.923.035	99,35%
		<b>Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional</b>		<b>159.181.668</b>	<b>105.419.290</b>	<b>66,23%</b>	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus BKD	66.744.870	26.437.125	39,61%
				Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	8.620.600	5.560.000	64,50%
				Pemeliharaan KDO/KDO Khusus BKD	21.485.022	13.765.989	64,07%
				Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	7.232.200	4.557.200	63,01%
		2	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	33.239.470	33.239.470	100,00%
				Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	21.859.506	21.859.506	100,00%

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, bahwa dari total pagu anggaran sebesar **Rp 343.946.369.875,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 338.594.177.404,-** atau **98.44%**. Persentase penyerapan tahun 2021 ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2020 yang hanya terealisasi dengan tingkat persentase sebesar **90.33%**. Meskipun terdapat kenaikan trend realisasi anggaran, masih terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang realisasi anggaran nya belum optimal sebagai berikut :

PD/UPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal	
BKD	1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rekrutmen CPNS dan PPPK Provinsi DKI Jakarta	3.281.168.960	2.053.263.200	62,58%	<p>Alokasi anggaran yang tersedia pada RSK Rekrutmen CPNS dan PPPK Provinsi DKI Jakarta sedianya akan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan meliputi : seleksi administrasi, SKD, SKB dan pemberkasan akhir. Namun, terdapat perubahan jadwal tahapan pengadaan CPNS/PPPK yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara melalui beberapa surat sebagai berikut :</p> <p>Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6201/B-KS.04.01/SD/2021;            Surat Plt. Kepala BKN Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K2021;            Surat Plt. Kepala BKN Nomor 18256/B-KS.04.01/SD/K/2021;            Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN No. 14333/B-KS.04.03/SD/D/2021.</p> <p>Adanya perubahan dimaksud, mengakibatkan proses rekrutmen CPNS dan PPPK di tahun 2021 hanya dapat diselesaikan sampai dengan tahapan SKB, sehingga alokasi anggaran yang akan digunakan untuk tahapan pemberkasan akhir tidak dapat terserap.</p> <p>Selain itu, terdapat pula efisiensi hasil pengadaan barang/jasa pada komponen sewa peralatan meliputi : sewa laptop, sewa meja, sewa AC standing dan sewa printer.</p>

PD/UPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
BKD	2	Pengelolaan Promosi ASN	655.200.000	319.200.000	48,72%	Alokasi anggaran pada RSK Seleksi Terbuka Jabatan meliputi kegiatan JPT Pratama sebanyak 2 tahap dan JPT Madya sebanyak 1 tahap. Adapun untuk Seleksi Terbuka JPT Madya telah mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk dilaksanakan tahun 2021, namun sesuai dengan arahan Gubernur Selaku PPK, pelaksanaan seleksi baru akan dilaksanakan tahun 2022, sehingga alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pembayaran honorarium Tim Pansel tidak dapat terealisasi secara optimal.
		Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management	148.800.000	99.900.000	67,14%	

PD/UPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal	
BKD	3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	36.000.000	2.400.000	6,67%	Dikarenakan masih dalam situasi pandemi covid-19, kegiatan pengambilan sumpah yang direncanakan 12 kali hanya bisa direalisasikan sebanyak 8 kali. Dari 8 kali pelaksanaan pengambilan sumpah berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 10/SE/IV/2020 tanggal 2 April 2020 kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS dilaksanakan secara virtual dan hanya peserta perwakilan hadir ditempat pelaksanaan kegiatan (Balikota Provinsi DKI Jakarta). Dari 8 kali pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PNS secara virtual tersebut hanya 1 kali penggunaan anggaran honorarium rohaniwan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk membatasi kontak langsung dari pihak luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Suban Jakarta Utara	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa administrasi keuangan	283.800	-	0,00%	Mekanisme pengadministrasian keuangan / SPJ dilakukan secara online sehingga buku cek perbankan tidak dipergunakan untuk transaksi
BKD	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus BKD	66.744.870	26.437.125	39,61%	Efisiensi hasil penyediaan barang/jasa
BKD		, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	8.620.600	5.560.000	64,50%	Efisiensi hasil penyediaan barang/jasa

PD/UPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
Sekr. DP Korpri	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus BKD	21.485.022	13.765.989	64,07%	Efisiensi hasil penyediaan barang/jasa
Sekr. DP Korpri		Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	7.232.200	4.557.200	63,01%	Efisiensi hasil penyediaan barang/jasa

## BAB. IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2021.

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

### B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah percepatan

pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang kepegawaian

2. Mengoptimalkan peran *controlling* pada internal BKD Provinsi DKI Jakarta agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat), mengingat adanya beberapa kegiatan BKD Provinsi DKI Jakarta yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Rekrutmen CASN, Kenaikan Pangkat dan Pensiun Terpadu.

**Lampiran 1 :**  
**Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BKD Provinsi DKI Jakarta**



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  2. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/JM.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun:

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Penetapan kinerja;
3. Laporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Desember 2018

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *h*



*Budihastuti*  
Budihastuti

NIP. 195903151985032005

Nomor : 38  
Tahun : 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

1	Meningkatnya kompetensi Indeks Profesionalitas ASN dan iklim kerja aparatur.	Skor/ Indeks	89,95	89,96	89,97	89,99	90,00	IP ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas pegawai ASN.
Terdiri dari 4 dimensi : Kualifikasi (bobot 25%) Kompetensi (bobot 40%) Kinerja (bobot 30%) Disiplin (bobot 5%)								
Formulasi perhitungan : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_j \cdot R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3 = W_x \cdot R_{3x}$ $IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$								
2	Terwujudnya pelayanan Indeks Kepegawaian Administrasi Pelayanan yang baik	Skor/ Indeks	78,00	81,00	86,00	90,00	93,00	Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan ASN Pemprov. DKI Jakarta terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan.
Formulasi Perhitungan : Rata-rata nilai dari survei (sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat).								



*[Signature]*  
Bastuti  
NIP. 195903151985032005

**Lampiran 2 :**  
**Dokumen Perjanjian Kinerja**  
**Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2021**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIA QIBTYA

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

MARIA QIBTYA  
NIP 196507191985032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Maria Qibthya  
 NIP : 196507191985032002  
 Jabatan : Kepala Badan  
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan		
						I	II	III	IV				
<b>Sasaran Strategis</b>													
1	Meningkatnya profesionalitas	1	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	e-SAKIP	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.  Definisi : Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN sesuai kewenangan BKD mencakup 3 dimensi dengan metode pembobotan meliputi : Dimensi kualifikasi (25%); Dimensi kinerja (30%); Dimensi disiplin (5%).  Metode Pengukuran : Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri.  Sumber data : SIMPEG dan SAPK	N/A	N/A	N/A	N/A	46,8	46,8	46,8	Nilai
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	1	Indeks Sistem Merit	e-SAKIP	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN; 2. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Definisi :	N/A	290	N/A	N/A	290	N/A	Nilai	

3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manajemen Perubahan</li> <li>Penguatan pengawasan</li> <li>Penguatan akuntabilitas</li> <li>Penataan Organisasi</li> <li>Penataan tata laksana</li> <li>Penataan manajemen SDM</li> <li>Deregulasi Kebijakan</li> <li>Peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> </ol> <p>Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.</p>	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq 80\%</math>. Apabila serapan anggaran di bawah <math>&lt; 80\%</math> maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = <math>(\text{Persentase Serapan Anggaran} \times 40\%)</math>. Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</li> <li>Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</li> <li>Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</li> </ol> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math> dan output 100%  <math>\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)</math></li> <li>Serapan Anggaran <math>&lt; 80\%</math> dan output <math>&lt; 100\%</math>  <math>\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></li> <li>Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math>, namun output <math>&lt; 100\%</math>  <math>\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></li> </ol>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persentase

5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor(12)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor(13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) nomor (17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) Nomor(17)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor(39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (41)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (41)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor(60)	100%	100%	100%	100%	Persentase
4		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	100%	100%	Persentase
5		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN Nomor(62)	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan Nomor(66)	N/A	100%	100%	100%	Persentase
1		1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City nomor (43)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Smart City Nomor(43)	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
2		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor(63)	100%	N/A	100%	100%	Persentase

	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta nomor (68)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta Nomor(68)	100%	100%	100%	100%	Persentase
<b>Sasaran Khusus</b>									
11	1	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	e-Kinerja	Persentase responden (PNS dan CPNS Pemprov. DKI Jakarta) yang mengisi survei kepuasan pelayanan kepegawaian, dimana unsur-unsur penilaiannya mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan pengaduan; 9. Sarana dan Prasarana Target capaian sebesar 75% dihitung dari jumlah PNS/CPNS Pemprov. DKI Jakarta yang mengisi form survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara elektronik melalui website etkbbd.jakarta.go.id dibandingkan dengan total jumlah PNS/CPNS Pemprov. DKI Jakarta di bulan berjalan pada saat dilaksanakannya survei dikali 100%.	N/A	75%	75%	75%	Persentase
12	1	Terlaksananya Implementasi nilai-nilai budaya kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	Tingkat pemahaman diukur melalui survey yang dilakukan secara online dan offline kepada ASN di 41 Perangkat Daerah.	N/A	80%	80%	80%	Persentase
13	1	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	3	WTP

15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfofik menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfofik.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB	N/A	N/A	N/A	A	A	100%	Predikat



**Lampiran 3 :**  
**Dokumen Rencana Aksi**  
**Perjanjian Kinerja Kepala BKD**  
**Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Tujuan		Sasaran Strategis		Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan		Output		Keterangan		
Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Sub Kegiatan	RSK	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Target		
1 Meningkatnya Profesionalitas ASN	2 Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	3 Terwujudnya manajemen ASN berbasis sistem merit	4 pengelolaan/Indeks Sistem ASN berbasis sistem merit	5 Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	6 TW.I : 290 TW.III : TW.IV : 468	7 Program Kepegawaian Daerah	8 Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9 Penyusunan Kajian Kebijakan Pengelolaan Tenaga Non PNS	10 1	11 1	12 Kajian	13 TW.I :- TW.III :- TW.IV : 1	14 -
								10 Peningkatan, Pengembangan dan Penguasaan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	11 1		Dokumen	TW.I :- TW.III :- TW.IV :-	
								11 Jumlah jabatan pedakana yang dilakukan verifikasi dan validasi sesuai peta jabatan	2400		Jabatan Pelaksanaan	TW.I : 700 TW.II : 500 TW.III : 500 TW.IV : 700	
								12 Kordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3000		SK CPNS/PPPK	TW.I :- TW.III :- TW.IV : 3000	
								13 Peningkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/Janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	25		SK PNS	TW.I :- TW.III :- TW.IV : 25	
								14 Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan	3000		SK	TW.I : 750 TW.II : 750 TW.III : 750 TW.IV : 750	
								15 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1		Laporan	TW.I :- TW.III :- TW.IV : 1	
								16 Proposal Usulan Anggaran Bantuan Hibah Atas APBD Tahun 2021 Perumpulan Werdama Jaya Provinsi DKI Jakarta (Hibah uang untuk Pagubuhan Werdama Jaya)	1		Laporan	TW.I :- TW.III :- TW.IV : 1	
								17 Proposal Program Kegiatan Yayasan KORPRI DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 (Hibah uang untuk YAYASAN KORPRI DKI JAKARTA)	1		Laporan	TW.I :- TW.III :- TW.IV : 1	
								18 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2		Aplikasi	TW.I :- TW.III :- TW.IV : 1	
								19 Pengelolaan dan Pemetaan Ansur Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	7000		Ansur	TW.II : 1250 TW.III : 3450 TW.IV : 2300	
								20 Digitalisasi dokumen data pegawai Provinsi DKI Jakarta yang dikelola secara digital	5000		Data Pegawai	TW.I :- TW.III : 900 TW.III : 2500 TW.IV : 1600	
								21 Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Luar Pemerintah dan Antar SKPD	100		ASN	TW.I : 15 TW.II : 25 TW.III : 30 TW.IV : 30	
								22 Jumlah peserta seleksi mutasi ASN dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	170		Peserta Seleksi	TW.I :- TW.III : 50 TW.IV : 65	
								23 Pengelolaan Kemakaian Pegawai ASN	1000		Sertifikat	TW.I :- TW.III :- TW.IV : 1000	





Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran Strategis		Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan		Doutput		Keterangan
			Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran				Volume	Sasaran	Target		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KOO/KOO Khusus		Nilai kepuasan terhadap layanan fasilitas BBM KOO/KOO Khusus BKO	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Penyenggaraan Koordinasi dan Komultasi SKPD	Rapat Penyusunan dan Pengambilan Pemahaman terhadap Peraturan Kepegawaian		Jumlah rancangan perlunya/keputusan/kebijakan di bidang kepegawaian yang tersusun tepat waktu	12	Rancangan Peraturan	TW I :2 TW II :4 TW III :4 TW IV :2
						Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengklapan Kantor	Penyediaan jasa mesin fotokopi		Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian	300	Pegawai	TW I :- TW II :75 TW III :150 TW IV :75
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan sewa mesin fotokopi		Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi BKO	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan KOO/KOO Khusus BKO		Nilai kepuasan terhadap layanan pemeliharaan KOO/KOO Khusus BKO	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja		Nilai kepuasan terhadap pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja BKO	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Pelelangan Kebersihan Kantor BKO	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa administrasi keuangan pada DP KORPRI Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Penyediaan perabotan rumah tangga pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan perabotan rumah tangga Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		Nilai Kepuasan terhadap Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KOO/KOO Khusus Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		Nilai Kepuasan terhadap layanan fasilitas BBM KOO/KOO Khusus Sekretariat DP Korpri	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4
						Penyediaan Jasa Surat Memuat	Penyediaan jasa administrasi surat/jumlah laporan kinerja petugas administrasi surat memuat/cetak yang disusun tepat pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		Laporan	12	Laporan	TW I :3 TW II :3 TW III :3 TW IV :3
						Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengklapan Kantor	Penyediaan sewa mesin fotokopi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Sekretariat DP Korpri	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :4



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran Strategis		Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan		Output		Keterangan
			Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran				Volume	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Jasa Peralihan dan Perengajaan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Barat	Nilai Kupon terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Barat	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4	
					Pelaksanaan Perusahaan dan Pengujian/Verifikasi Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kupon Terhadap Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Penyediaan Peralatan dan Perengajaan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kupon Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kupon terhadap Penyediaan barang cetakan dan penggantian Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Penyediaan Jasa Peralihan dan Perengajaan Kantor	Penyediaan jasa mesin fotokopi Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kupon terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralihan dan perlengkapan kerja Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kupon terhadap Pemeliharaan peralihan dan perlengkapan kerja Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kupon terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nilai Kupon Terhadap Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Penyediaan Peralatan dan Perengajaan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nilai Kupon Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nilai Kupon terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Penyediaan Jasa Peralihan dan Perengajaan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nilai Kupon terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralihan dan perlengkapan kerja Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nilai Kupon terhadap Pemeliharaan Peralihan dan Perlengkapan Kerja Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nilai Kupon terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Suku Badan Kegawalan Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV : 4		



Februari 2021  
Kepala Bidang Kepegawaian Daerah  
Badan Kepegawaian Daerah  
Jalan Sisinga No. 100  
Kecamatan Mampang Praya  
Kotamadya Jakarta Selatan  
12130

Maria Obbya  
KIP 19460791985032002

**Lampiran 4 :**  
**Data Rekapitulasi Capaian**  
**Indikator Kinerja Persentase**  
**Kualitas Pelaksanaan Anggaran**  
**Tahun 2021**

**REALISASI INDIKATOR PRESENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021**

NO	PD/UKPD	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN SUB KEGIATAN DI BAWAH PROGRAM PENUNJANG	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI	EFISIENSI (100% - SERAPAN )	PENGUKURAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	328.537.756.922	325.553.017.163	99,09%	0,91%	90,45%
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	12.163.940	11.085.400	91,13%	8,87%	94,43%
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	523.105.529	454.616.910	86,91%	13,09%	96,55%
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	60.775.000	60.157.900	98,98%	1,02%	90,51%
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	268.917.000	198.640.750	73,87%	0,00%	90,00%
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	100%	33.239.470	33.239.470	100,00%	0,00%	90,00%
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	4.368.510	4.357.300	99,74%	0,26%	90,13%
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	28.800.000	28.800.000	100,00%	0,00%	90,00%
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	149.846.400	149.846.400	100,00%	0,00%	90,00%
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	66.744.870	26.437.125	39,61%	0,00%	90,00%
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	8.620.600	5.560.000	64,50%	0,00%	90,00%
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	62.778.067	61.958.600	98,69%	1,31%	90,65%
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	33.115.170	30.960.600	93,49%	6,51%	93,25%
15	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	36.226.432	27.154.589	74,96%	0,00%	90,00%

NO	PD/UKPD	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN SUB KEGIATAN DI BAWAH PROGRAM PENUNJANG	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI	EFISIENSI (100% - SERAPAN )	PENGUKURAN
16	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	7.172.880	6.844.200	95,42%	4,58%	92,29%
17	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	59.314.200	52.113.600	87,86%	12,14%	96,07%
18	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	6.102.151	4.222.500	69,20%	0,00%	90,00%
19	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	283.800	-	0,00%	0,00%	90,00%
20	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	29.045.221	28.680.850	98,75%	1,25%	90,63%
21	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	2.981.550	2.975.500	99,80%	0,20%	90,10%
22	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.461.600	37.435.200	99,93%	0,07%	90,04%
23	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	3.684.153	3.635.500	98,68%	1,32%	90,66%
24	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	429.792	390.000	90,74%	9,26%	94,63%
25	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	43.466.249	43.465.400	100,00%	0,00%	90,00%
26	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	3.228.830	3.228.830	100,00%	0,00%	90,00%
27	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.461.600	28.380.000	75,76%	0,00%	90,00%

NO	PD/UKPD	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN SUB KEGIATAN DI BAWAH PROGRAM PENUNJANG	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI	EFISIENSI (100% - SERAPAN )	PENGUKURAN
28	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	25.583.855	24.682.900	96,48%	3,52%	91,76%
29	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1.319.670	1.100.000	83,35%	16,65%	98,32%
30	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	1.750.804	1.545.000	88,25%	11,75%	95,88%
31	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	1.576.300	1.400.000	88,82%	11,18%	95,59%
32	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	474.100	431.000	90,91%	9,09%	94,55%
33	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	29.780.027	23.550.428	79,08%	0,00%	90,00%
34	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	24.725.635	22.855.000	92,43%	7,57%	93,78%
35	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	7.129.738	7.128.748	99,99%	0,01%	90,01%
36	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.461.600	37.461.600	100,00%	0,00%	90,00%
37	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	8.378.810	8.378.810	100,00%	0,00%	90,00%
38	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	2.905.749	2.905.749	100,00%	0,00%	90,00%
39	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	5.045.000	4.310.000	85,43%	14,57%	97,28%

NO	PD/UKPD	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN SUB KEGIATAN DI BAWAH PROGRAM PENUNJANG	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI	EFISIENSI (100% - SERAPAN )	PENGUKURAN
40	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	95.179.953	95.063.210	99,88%	0,12%	90,06%
41	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	22.624.250	18.370.000	81,20%	18,80%	99,40%
42	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	15.699.750	15.466.000	98,51%	1,49%	90,74%
43	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	100%	21.859.506	21.859.506	100,00%	0,00%	90,00%
44	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	497.133.806	493.923.035	99,35%	0,65%	90,32%
45	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	224.769.600	198.000.000	88,09%	11,91%	95,95%
46	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	7.232.200	4.557.200	63,01%	0,00%	90,00%
47	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	21.485.022	13.765.989	64,07%	0,00%	90,00%
48	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	35.609.244	35.244.000	98,97%	1,03%	90,51%
<b>RATA - RATA</b>							<b>87,98%</b>	<b>3,60%</b>	<b>91,80%</b>

**Lampiran 5 :**  
**Data Rekapitulasi Capaian**  
**Kegiatan Strategis Daerah (KSD)**  
**BKD Tahun 2021**

**DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD) & RENCANA AKSI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	% Capaian
<b>KSD 61 - Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan</b>						
1	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B06	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 25 nama jabatan. Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator	100%
2	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B09	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 40 nama jabatan.  Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator.	100%
3	Penyusunan Kompetensi Standar	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B12	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator untuk 135 nama jabatan.  Data Dukung: Dokumen kamus kompetensi teknis jabatan administrator.	100%
4	Pola Pengembangan Karir	Tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi	Pola karier dan peta jabatan pimpinan tinggi	B12	1. Tersusunnya Update Rancangan peta jabatan pimpinan tinggi yang menjadi dasar dalam menentukan jalur karier jabatan; 2. Tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi.  Data Dukung: 1. Update Rancangan peta jabatan pimpinan tinggi yang menjadi dasar dalam menentukan jalur karier jabatan; 2. Peraturan Gubernur tentang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi.	100%
5	Penyusunan Talent Pool	Tersedianya tools untuk memetakan pejabat pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya atau sebagai bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi.	Tersedianya database profil potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan kompeten untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan surat keputusan yang berlaku.	B09	Penyusunan database profil kinerja dan kompetensi pegawai berdasarkan kuadran talent pool Data Dukung: Database profil kinerja dan kompetensi pegawai berdasarkan kuadran talent pool	100%

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	% Capaian
No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	% Capaian
<b>KSD 68 - Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta</b>						
1	Sosialisasi Nilai-nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Tersosialisasikannya Nilai-Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Tersosialisasikannya Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja	B03	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 1	100%
				B06	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 2	100%
				B09	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 3	100%
				B12	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta TW 4	100%
2	Penyusunan Program kerja agen perubahan	Tersusunnya Program kerja agen perubahan	Tersusunnya dokumen program kerja agen perubahan	B06	1. Program kerja agen perubahan 2. Materi agen perubahan budaya kerja	100%
3	Penyusunan Road Map Transformasi Budaya	Tersusunnya Road Map Transformasi Budaya Kerja	Tersusunnya Pergub Road Map Transformasi Budaya Kerja	B09	Kajian Road Map Transformasi Budaya Kerja	100%
				B12	Pergub/Kepgub terkait Road Map Transformasi Budaya	90%
4	Pelaksanaan agen perubahan sharing forum	Terjadinya knowledge sharing dalam sharing forum bagi agen perubahan	Terlaksananya sharing forum bagi agen perubahan	B12	Pelaksanaan sharing forum bagi agen perubahan	100%
5	Penyusunan Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Ditetapkannya Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	B12	Keputusan Gubernur terkait Tim Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	100%